



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KECAMATAN SAMBALIUNG
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN SAMBALIUNG

Jl.

2026



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho Nya sematalah, maka kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2025 dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj-IP) dan Perjanjian Kerja. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menetapkan bahwa setiap akhir Tahun Anggaran Instansi Pemerintah, menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) kepada Presiden dan salinannya kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Diharapkan dengan adanya LKjIP ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dapat tergambar dengan jelas, sehingga dapat memudahkan serta menjadi pedoman bagi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menilai kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Sambaliung, Januari 2026

Camat Sambaliung,

Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp

Pembina

NIP. 19690918 199212 1 001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Sambaliung Tahun 2021–2026 serta selaras dengan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Berau.

Dalam pelaksanaannya, Kecamatan Sambaliung menetapkan tujuan utama yaitu:

1. *Meningkatnya Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat*”
dengan sasaran sebagai berikut:
1. “meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum kepada masyarakat”

Dalam rencana target kinerja sasarnya berupa Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,30, dengan strategi pencapaian **“Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung”** sesuai yang tercantum pada Renstra Kecamatan Sambaliung 2021-2026

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, indikator kinerja utama (IKU) telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,96 melampaui target yang ditetapkan pada Renstra Kecamatan Sambaliung 2021-2026.

Dari sisi akuntabilitas, pengelolaan keuangan Kecamatan Sambaliung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi anggaran menunjukkan tingkat serapan yang baik, realisasi fisik mencapai 92,49 %.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, antara lain:

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik (SPBE);
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
- Penguatan integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja;
- Peningkatan kualitas data dan pelaporan kinerja.

Sebagai tindak lanjut, Kecamatan Sambaliung akan terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem akuntabilitas kinerja, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Demikian LKj-IP ini dibuat, semoga Laporan ini dapat menjadi media komunikasi bagi pihak yang berkepentingan dalam menilai Kinerja Kecamatan



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Lampiran	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi	5
1.4 Sumber Daya Manusia	30
1.5 Permasalahan Utama (Isu Strategis)	35
BAB II. PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	38
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	38
2.1.1 Visi dan Misi	38
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	41
2.1.3 Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program	43
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	45
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	45
2.4 Perjanjian Kinerja	63
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	64
3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	64
3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah	70
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung.....	74
3.3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	74
3.3.2 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	81
3.3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/OPD.....	87
3.3.4 Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	87
3.3.5 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya	89
3.3.6 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	90
3.4 Realisasi Anggaran	90
BAB IV. PENUTUP	97



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Kecamatan.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk.....	4
Tabel 1.3	Pegawai Kecamatan Sambaliung Menurut Pendidikan.....	33
Tabel 1.4	Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sambaliung Menurut Golongan Data Tahun 2025.....	33
Tabel 1.5	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Golongan (Orang).....	34
Tabel 1.6	Sumber Daya Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Berdasarkan Gender.....	34
Tabel 1.7	Sumber Daya Kantor Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau Berdasarkan Gender	35
Tabel 2.1.2.1	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2021-2026	43
Tabel 2.1.2.2	Target Sasaran Kinerja Tahun 2025	43
Tabel 2.1.3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan	44
Tabel 2.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 2025	45
Tabel 2.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	47
Tabel 2.3.2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025	48
Tabel 2.4.1	Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung 2025	63
Tabel 3.1.1	Kategori Penilaian	64
Tabel 3.1.2	Tindak Lanjut Kecamatan Sambaliung atas Hasil Evaluasi LKJIP tahun sebelumnya	65
Tabel 3.1.3	Tabel Capaian Realisasi Akhir anggaran TA 2025	69
Tabel 3.2.1	Aspek Keberadaan	71
Tabel 3.2.2	Aspek Kualitas dan Pemanfaatan	72
Tabel 3.2.3	Predikat dan Interpretasi	72
Tabel 3.2.4	Nilai dan Predikat AKIP 2024 Kec. Sambaliung dari Inspektorat	73
Tabel 3.3.1.1	Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung 2021-2026	75
Tabel 3.3.1.2	Target Sasaran Kinerja Tahun 2025	75
Tabel 3.3.1.3	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	75
Tabel 3.3.1.4	Tabel Perbandingan Sasaran I Target dan Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung 2021-2025.....	77
Tabel 3.3.1.5	Tabel Perbandingan Sasaran II Hasil Penilaian AKIP 2020-2024 Kecamatan Sambaliung.....	77
Tabel 3.3.1.6	Nilai dan Predikat AKIP Tahun 2024.....	77
Tabel 3.3.1.7	Nilai dan Predikat AKIP 2023	78
Tabel 3.3.1.8	Tabel Nilai Predikat AKIP Tahun 2021.....	79
Tabel 3.3.1.9	Tabel Nilai dan Predikat AKIP Tahun 2020.....	79
Tabel 3.3.1.10	Tabel Nilai dan Predikat AKIP Tahun 2019	80
Tabel 3.3.1.11	Pembandingan Target & Capaian Realisasi Kinerja Anggaran dalam 5 Tahun.....	80



Tabel 3.3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Sambaliung.....	82
Tabel 3.3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/OPD Lain	87
Tabel 3.3.4.	Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya	89
Tabel 3.3.5.	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	90
Tabel 3.4.1	Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal Kecamatan Sambaliung Tahun 2025	91
Tabel 3.4.2	Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 hingga bulan Desember 2025 Kecamatan Sambaliung.....	91
Tabel 3.4.3	Jenis Pelayanan di Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2025.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja.....	99
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.....	101
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Tahunan.....	118
Lampiran 4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....	119
Lampiran 5	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 2021 – 2026.....	120
Lampiran 6	Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	126
Lampiran 7	Cascading/Pohon Kinerja.....	127
Lampiran 8	Crosscutting Kecamatan Sambaliung Tahun 2025.....	128



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Kecamatan Sambaliung	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2025	30
Gambar 3	Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Sambaliung Tahun 2025	31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), setiap instansi pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja secara konsisten dan terukur. Salah satu instrumen utama dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kinerja.

Kecamatan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah. Dalam menjalankan peran tersebut, Kecamatan Sambaliung dituntut untuk mampu menunjukkan kinerja yang terukur, efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil (*outcome*), bukan hanya pada realisasi kegiatan (*output*).

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** menjadi kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu tahun anggaran. LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, serta sebagai dasar dalam perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Sambaliung Tahun 2025 mengacu pada dokumen perencanaan kinerja, yaitu **Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambaliung Tahun 2021–2026, Perjanjian Kinerja Tahun 2025**, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dalam **RPJMD Kabupaten Berau**. Selain itu, penyusunan laporan ini juga telah memperhatikan prinsip keterpaduan dengan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui pemanfaatan **Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**.

Dalam konteks penguatan akuntabilitas, Kecamatan Sambaliung terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja melalui penyempurnaan indikator kinerja yang terukur, peningkatan kualitas data, serta penguatan evaluasi kinerja berbasis hasil. Hal ini dilakukan untuk mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, penyusunan LKjIP Kecamatan Sambaliung Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Gambaran umum Kecamatan Sambaliung sebagai berikut:

1. Letak Geografis



Gambar 1. Peta Kecamatan Sambaliung

Kecamatan Sambaliung merupakan salah satu Kecamatan dari 13 (tiga belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau dan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau. Kecamatan Sambaliung adalah Kecamatan yang terletak disepanjang alur sungai Kelay dan sungai Berau dengan Ibu Kota Kecamatan berdekatan dengan Ibu Kota Kabupaten Berau Tanjung Redeb yang hanya berjarak $\pm$ 2 (Dua) km.

Batas wilayah Kecamatan Sambaliung meliputi :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Tabur
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Tabalar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tabalar dan Kecamatan Kelay, dan
4. Sebelah Barat : Kecamatan Pulau Derawan dan Laut Sulawesi.



Secara geografis Kecamatan Sambaliung memiliki kedudukan yang cukup strategis karena Ibu Kotanya berada di daerah Perkotaan, sehingga menjadi salah satu Kecamatan Penyangga dari Ibu Kota Kabupaten Berau Tanjung Redeb.

2. Luas Kecamatan

Kecamatan Sambaliung sebagai Kecamatan penyangga dari Tanjung Redeb sebagai Ibukota Kabupaten Berau menempati ruang wilayah seluas 2.403, 86 Km², terdiri dari 13 (Tiga Belas) Kampung dan 1 (Satu) Kelurahan, yaitu :

Tabel 1.1

No	Kampung/Kelurahan	Daratan	Perairan	Jumlah
1.	Long Lanuk	427,11	-	427,11
2.	Tumbit Dayak	81,19	-	81,19
3.	Bena Baru	47,29	-	47,29
4.	Inaran	395,86	-	395,86
5.	Pegat Bukur	62,49	-	62,49
6.	Rantau Panjang	14,13	-	14,13
7.	Sambaliung	81,93	-	81,93
8.	Sei Bebanir Bangun	42,32	-	42,32
9.	Gurimbang	125,72	-	125,72
10.	Tanjung Perangat	55,11	-	55,11
11.	Sukan Tengah	194,42	-	194,42
12.	Suaran	494,52	-	494,52
13.	Pesayan	96,44	-	96,44
14.	Pilanjau	150,88	48,74	199,62
	KECAMATAN	2401,41	48,74	2.451,15

Kampung terluas di Kecamatan Sambaliung adalah Kampung Suaran sebesar 494,52 Km², dan Kampung terkecil adalah Kampung Rantau Panjang sebesar 14,13 Km².

3. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kecamatan Sambaliung terdiri atas wilayah daratan, gunung dan perbukitan yang landai. Luas wilayah Kecamatan Sambaliung mencapai



2451.15 km², yang mana sebagian besar adalah merupakan wilayah daratan yaitu mencapai 2402.41 km², sedang wilayah perairan hanya 48,74 km². Kecamatan Sambaliung tidak memiliki wilayah perairan laut.

4. Kondisi Demografi

Saat ini Kecamatan Sambaliung merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar nomor 2 setelah Kecamatan Tanjung Redeb, sampai dengan Desember 2024 berjumlah 36.369 jiwa.

5. Iklim

a. Temperatur

Dari keterangan yang diperoleh, bahwa suhu rata – rata pada siang hari adalah 28,6 °C dengan suhu tertinggi 32,1 °C sedangkan pada malam harinya 23,4 °C . Temperatur maksimum rata- rata 29,8 °C dan minimum rata- rata 23 °C , dengan demikian Kecamatan Sambaliung termasuk beriklim tropis.

b. Angin

Sesuai dengan keadaan topografis Kecamatan Sambaliung yang dikelilingi oleh 2 (dua) buah sungai besar yaitu Sungai Berau dan Sungai Kelay, sehingga pada musim selatan angin timur bertiup agak kencang pada sore dan malam hari, dan pada waktu cuaca buruk sekali sering disertai dengan hujan dan tiupan angin kencang.

6. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Sambaliung Januari 2024 s/d Desember 2024 adalah 44.532 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2

No.	Kampung	Jumlah RT	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Long Lanuk	5	537	481	1.018
2.	Tumbit Dayak	7	1.159	1.060	2.219
3.	Bena Baru	5	516	497	1.013
4.	Inaran	6	316	261	577
5.	Pegat Bukur	6	1.097	860	1.987
6.	Rantau Panjang	3	514	415	929
7.	Sambaliung	23	9.113	8.205	17.318
8.	Sei Bebanir Bangun	13	2.160	2.193	4.354
9.	Gurimbang	7	955	796	1.751
10.	Tanjung Perangat	7	680	601	1.281
11.	Sukan Tengah	14	1.543	1.293	2.836



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

12.	Suaran	6	2.072	1.742	3.814
13.	Pesayan	8	773	730	1.503
14.	Pilanjau	11	1.142	1.022	2.164
	KECAMATAN	120	23.826	20.706	44.532

7. Lembaga Pemerintahan

- a. Pemerintah Kelurahan terdapat 1 (satu) Kelurahan yaitu : Sambaliung
- b. Pemerintah Kampung terdapat 13 (tiga belas) Kampung yaitu : Long Lanuk, Tumbit Dayak, Bena Baru, Inaran, Pegat Bukur, Rantau Panjang, Sei Bebanir Bangun, Gurimbang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, Suaran, Pesayan dan Pilanjau
- c. Jumlah RT se Kecamatan Sambaliung yaitu **121 RT.**

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Sambaliung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kecamatan Sambaliung merupakan unsur kewilayahan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung dan Kelurahan dan Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan sebagai berikut :

1. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - a. Menyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
 - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
 - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
 - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan/atau kelurahan



- 6



- Kelompok Jabatan Fungsional

i. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Rincian tugas pokok Kecamatan sebagai berikut :

a. Camat

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan rencana strategik kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di kampung/kelurahan dan kecamatan.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan
- d. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- e. Melakukan koordinasi dengan kepolisian negara ri dan atau tnimengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteramandan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- f. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- g. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturanperundang-undangan.
- h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan atau Kepolisian Negara RI.
- i. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerahdan atau instansi vertikal yang tugas dan fingsinya di bidangpemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
- j. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.



- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- l. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan kampung dan atau kelurahan
- m. Memberikan bimbingan supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi kampung dan atau kelurahan.
- n. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala kampung dan atau lurah.
- o. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kampung dan/atau kelurahan.
- p. Melakukan percepatan pencapaian spm (standar pelayanan minimal) di wilayah kecamatan
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan.
- r. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun sesuai rencana strategik dan program kerja kecamatan .
- s. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan program kerja kecamatan.
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kecamatan di bidang pengelolaan kesekretariatan yang meliputi administrasi penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan administrasi keuangan untuk mendukung kelancaran tugas dan kegiatan Kecamatan dengan memberikan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi Kecamatan, Sekretaris mempunyai rincian tugas Sebagai Berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.



- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sekretariat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para Kepala Sub Bagian agar pekerjaan Sekretariat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku.
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sekretariat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja.
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis administratif baik intern Kecamatan maupun unit kerja lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan dan bimbingan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan dilingkungan Kecamatan gunatertib administrasi.
- h. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya pengelolaan surat- menyurat, perlengkapan rumah tangga, inventaris, humas dan protokol serta urusan umum.
- i. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Kecamatan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- k. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.
- l. Melaporkan kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai



bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- m. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

c. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi penyusunan program pembangunan di Kecamatan, mengidentifikasi permasalahan, pengumpulan data, mengevaluasi dan memonitor kegiatan dan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas serta pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan dan aset Kecamatan, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai



dasar dalam melaksanakan pekerjaan

- f. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sebagai bahan penyusunan program Kecamatan
- g. Mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
- h. Mempelajari dan menganalisa tujuan-tujuan realistis yang dapat dicapai dalam perencanaan program sesuai dengan kebijakan strategis jangka pendek, menengah dan panjang;
- i. Menyusun konsep telaahan tentang prioritas program dan anggaran sesuai isu-isu sentral dan lokal sebagai bahan pengambilan keputusan
- j. Memberi dukungan perumusan konsep program dan kegiatan serta rencana strategis dinas agar penyusunan program kerja berjalan dengan baik dan tepat waktu
- k. Menyelenggarakan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta dokumen pelayanan publik Kecamatan dengan membimbing dan mengarahkan bawahan agar penyusunan dokumen tersebut selesai dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- l. Menyiapkan bahan sosialisasi dan koordinasi hasil rumusan penyusunan program kepada masing-masing unit kerja untuk dijadikan sebagai rencana kerja
- m. Meneliti dan memverifikasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan mencocokkannya pada tanda bukti penerimaan dan pengeluaran untuk menghindari kekeliruan dalam pengelolaan keuangan Kecamatan.
- n. Mengevaluasi realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan membandingkan target/plafon untuk mengetahui penyerapan anggaran lingkup Kecamatan.
- o. Mengendalikan pembayaran belanja langsung, gaji dan pemotongan pajak-pajak dalam rangka tertib administrasi keuangan Kecamatan.
- p. Membimbing dan mengawasi pelaksanaan pembukuan satuan pemegang kas agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kecamatan.
- q. Menyusun instrumen pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program,



- kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- r. Membina dan mengawasi pelaksanaan pembukuan dan administrasi barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - s. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perlengkapan lainnya berdasarkan masukan dari satuan organisasi di lingkungan Kecamatan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - t. Mengatur pengelolaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan lainnya terhadap satuan organisasi di lingkungan Kecamatan agar penggunaannya efektif dan efisien.
 - u. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
 - v. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan rencana dan realisasinya yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - w. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Aset berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - x. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
 - y. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

d. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan Kecamatan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang



- tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
 - e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. Mengatur dan mengawasi petugas kebersihan dan keamanan agar selalu tercipta suasana aman, bersih dan tertib;
 - g. Mengatur kegiatan ketatalaksanaan yang meliputi suratmenyurat, penggandaan dan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis administrasi perkantoran;
 - h. Mengontrol proses administrasi perjalanan dinas pegawai dilingkungan Kecamatan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan kegiatan rapat/pertemuan-pertemuan yang meliputi administrasi rapat, konsumsi, ruang rapat, bahan-bahan/materi rapat sehingga kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
 - j. Mengatur pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, penjenjangan/diklat, karpeg, taspen, karis/karsu, cuti dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepegawaian;
 - k. Memproses administrasi urusan kesejahteraan dan kesehatan pegawai menurut ketentuan yang berlaku;
 - l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;



- n. Melaporkan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasidan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagaibahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

e. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemerintahan yang meliputi pelaksanaan dan pelayanan administrasi pemerintahan umum dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kelurahan. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik padabawahan dan tugas Seksi Pemerintahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agarpekerjaan Seksi Pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemerintahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksipemerintahan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/ lurah
- g. Mengontrol penyiapan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan



pemerintahan dan keagrariaan;

- h. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon;
- i. Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Mengontrol penyusunan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah;
- l. Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/kelurahan
- m. Memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- n. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan

f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan dan



pembinaan ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan ideologi serta pembinaan Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
- f. Membimbing pelaksanaan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Regu Linmas Kecamatan
- g. Mengontrol proses menerima, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk mendapat tanggapan serta penyelesaian
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insidentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya
- i. Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin
- j. Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan dilingkungan Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat jadwal piket
- k. Mengontrol pelaksanaan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk



hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait

- l. Mengontrol pelaksanaan penegakan produk hukum daerah melalui operasi yustisi bekorsa sama dengan instansi terkait
- m. Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian
- o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah
- p. Melaporkan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pemberdayaan masyarakat yang meliputi pelaksanaan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan perekonomian, Mengadakan pembinaan masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membuat laporan pembangunan di wilayah Kecamatan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi



- Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
 - e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksipemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan
 - f. Membimbing inventarisasi masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala Kampung/Lurah
 - g. Membimbing pengumpulan/pengolahan dan evaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja Kecamatan
 - h. Mengontrol kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, industri rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
 - i. Mengontrol kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
 - j. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana prasarana di lingkungan;
 - k. Membimbing pelaksanaan fasilitasi temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat kecamatan
 - l. Mengontrol penyusunan daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan bersama petugas teknisnya.
 - m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan.
 - n. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian
 - o. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah.



- p. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- q. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

h. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial yang meliputi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembinaan di bidang sosial, agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang



berlaku

- g. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
- h. Membimbing Monitoring pendistribusian bantuan Raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan.
- i. Mengontrol pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan di bidang agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan
- j. Mengontrol pelaksanaan fasilitas dan pemantauan pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah kecamatan baik dana berasal dari pemerintah maupun dari swasta;
- k. Membimbing pengolahan data bidang kesejahteraan sosial.
- l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- n. Melaporkan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

i. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Camat di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan terhadap kurikulum pendidikan serta pembinaan kebudayaan, Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:



- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pelayanan umum melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi Pelayanan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membimbing pelaksanaan survei kepuasan masyarakat di bidang pelayanan umum;
- i. Mengontrol pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan umum;
- j. Menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- m. Membimbing pengolahan data bidang pelayanan umum;
- n. Mengontrol pembuatan rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- o. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan



pembinaan kepegawaian;

- p. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi pelayanan umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. Melaporkan kegiatan Seksi Pelayanan Umum berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

j. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan

Organisasi Kelurahan Sambaliung Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka perlu diatur kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Lurah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas Pokok di Kelurahan sebagai berikut:

1. Lurah dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam pasal 31 mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan program pembangunan yang menjadi tanggung jawab kelurahan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan;
- c. Mengatur mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas kelurahan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas kelurahan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;



- e. Memeriksa, mengecek, mengoreksi dan mengontrol serta mengesahkan hasil kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Mengkaji, meneliti dan mengevaluasi program kerja kelurahan berdasarkan realisasi pelaksanaan program untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dan dalam rangka merancang program lanjutan serta penyusunan laporan kinerja;
- g. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- h. Membina pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat;
- i. Mengarahkan penyelenggaraan pelayanan Masyarakat;
- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- m. Membina penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- n. Membina kelompok jabatan fungsional;
- o. Mengawasi pelaksanaan tugas dan kegiatan setiap satuan organisasi agar pelaksanaan tugas kelurahan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan;
- p. Memberi saran dan pertimbangan kepada camat tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulissebagai bahan pertimbangan camat dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- q. Menyampaikan laporan kepada camat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi an pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- r. Melakukan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan;

2. Secretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pada secretariat dalam hal penyusunan program, administrasi dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan sebagai pedoman kerja;
- b. Mempelajari dan mengumpulkan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, administrasi umum, kepegawain, perlengkapan dan keuangan sebagai dasar dan pedoman kerja;



- c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup secretariat supaya tercapai yang baik pada bawahan;
- d. Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk terlaksananya peningkatan kerja bawahan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program secretariat dengan semua seksi supaya didapat program kerja yang baik dan efektif dan mampu mengakomodasi semua keperluan dan kegiatan kelurahan;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum kelurahan berupa pengaturan surat-menyerurat, penyusunan peraturan – peraturan dan ketatausahaan lainnya agar terpenuhi tertib administrasi;
- g. Menyelenggarakan koordinasi pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang arsip dan dokumentasi untuk mengetahui tingkat keberhasilannya;
- h. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan barang milik Negara pemerintah dan mengawasi pemakaiannya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan;
- i. Menyelenggarakan administrasi keuangan kelurahan untuk dicapainya tertib administrasi keuangan dan pemakaian keuangan Negara yang efektif dan efisien;
- j. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- k. Membuat laporan kegiatan secretariat dan laporan kegiatan kelurahan baik bulanan maupun tahunan secara periodik sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja seksi Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;



- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerja seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai perturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan , kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi pemerintahan , ketentraman dan ketertiban melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban dengan pedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. Membimbing penyiapan pedoman pelaksanaan pembinaan dibidang ketentraman dan ketertiban serta kerukunan warga dan kesatuan bangsa;
- g. Merencanakan pembinaan ketertiban masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yuridis bersama instansi terkait;
- h. Melakukan koordinasi baik intern, satuan kerja maupun dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. Mengontrol pelaksanaan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang kependudukan (keterangan domisili, kelahiran, kematian, datang dan pindah dari/keluar wilayah) dan pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan permohonan;
- k. Membimbing pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pertanahan sipil guna terciptanya perlindungan terhadap masyarakat;
- l. Mengatur mengendalikan kegiatan pengawasan dilingkungan kantor Lurah;
- m. Membimbing penyiapan bahan pemecahan masalah dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan peraturan perundang-undanganyang berlaku;
- n. Mengontrol fasiltasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum pemilihan Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- o. Memantau situasi wilayah Kelurahan setiap saat dalam rangka gangguan ancaman masyarakat Kelurahan;
 - p. Mengontrol pembuatan laporan kependudukan secara berkala berdasarkan buku register kependudukan yang dicatat oleh pemroses administrasi pemerintahan;
 - q. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
 - r. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan ketertiban berdasarkan rencana dan realisasi untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - s. Emlaporkan kegiatan Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - t. Member saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
 - u. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- 4 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 mempunyai rincian tugas:**
- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Mengatur mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu.
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang



- ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
 - f. Membimbing pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data dibidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja kelurahan;
 - g. Mengontrol pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat guna meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 - h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara kerjasama dan sarana fisik dilingkungan kelurahan;
 - i. Membimbing pelaksanaan fasilitas musyawarah pembangunan tingkat kelurahan dengan melibatkan LPM, Tokoh Masyarakat, Agama, dan pemuda dalam rangka menyusun program pembangunan diwilayah kelurahan;
 - j. Membimbing penyusuna daftar usulan kegiatan pembangunan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan sebagai bahan usulan program pembangunan kelurahan;
 - k. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan diwilayah kelurahan;
 - l. Mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegwaian;
 - m. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
 - n. Melaporkan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - o. Memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang- langkah langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;



- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

5 Seksi Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 mempunyai rincian tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelayanan Umum dan kesejahteraan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan.
- f. Melakukan koordinasi baik intern satuan kerja maupun dengan instansi terkait dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- g. Membimbing pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial sebagai bahan penyusunan rencana dan program serta laporan kegiatan seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial;
- h. Mengontrol penyusunan dan penetapan standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengontrol pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dibidang pelayanan umum dan kesejahteraan Sosial;



- j. Mengontrol pengelolaan pengaduan Masyarakat dibidang pelayanan umum dan kesejahteraan social;
- k. Melaksanakan peninjauan lokasi atas permohonan rekomendasi, HO, Situ, keterangan, usaha untuk memastikan kebenaran data yang diajukan permohonan dalam rangka pembuatan rekomendasi;
- l. Membimbing pelaksanaan proses penyelesaian admin;
- m. istrasi bantuan kepada masyarakat serta mengatur dan mengawasi pendistribusian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Membimbing fasilitas pelaksanaan pembinaan kerukunan kehidupan umat beragama, kepemudaan, keolahragaan, pemeberdayaan, perempuan, keluarga berencana serta Pembinaan kesehatan masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga;
- o. Membimbing fasilitasi program pendidikan dan peningkatan pengetahuan masyarakat yang bekerjasama dengan lintas sectoral;
- p. Mengontrol pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran bantuan terhadap korban bencana;
- q. Membina dan memfasilitasi kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah serta pemungutan dana palang merah Indonesia;
- r. Mengevaluasi dan menilai kerja / prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugass yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- s. Mengevalausi hasil pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan umum dan kesejahteraan social berdasrkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- t. Melaporkan kegiatan seksi pelayanan umum dan kesejahteraan social berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- u. Memberi sarana dan pertimbangan kepada atasan tetang langkah-langkah/ tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi secara umum adalah sebuah susunan komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Dengan adanya struktur tersebut maka bisa mengetahui pekerjaan dari sebuah organisasi tertata dengan baik. Struktur tersebut merupakan komponen penting yang harus ada dalam organisasi yang memuat terkait pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian di lingkungan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Kecamatan Sambaliung ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat membawahi :
 - a. Kasubag Sungram, Keuangan dan Aset
 - b. Kasubag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Kesejahteraan Sosial
8. Kelurahan
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi pada Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2025



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

2. Struktur Organisasi Kelurahan Sambaliung Tahun 2025 terdiri dari:

1. Lurah;
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
6. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan 2025

1.4. Sumber Daya Manusia

Pendekatan Pengembangan SDM dengan mengarahkan agar setiap individu dalam organisasi memiliki meta kecerdasan, ditempuh dalam upaya meningkatkan pemahaman syarat terhadap nilai-nilai dalam etika Birokrasi, nilai-nilai tersebut :

1. Nilai-nilai dalam pembukaan UUD 1945
2. Komitmen dan Konsistensi terhadap Visi, Misi dan tujuan organisasi
3. Kewenangan dan Tanggung Jawab
4. Keihlasan dan Kejujuran
5. Integritas dan Profesionalisme
6. Kreatifitas dan Kepekaan terhadap lingkungan tugas
7. Kepemimpinan dan Keteladanan
8. Kebersamaan dan dinamika Kelompok Kerja
9. Ketepatan dan Kecepatan
10. Rasionalitas dan Kecerdasan emosi
11. Keteguhan dan Ketegasan



12. Keberanian (dalam mengambil keputusan dan menangani konflik)
13. Dedikasi dan Loyalitas
14. Semangat dan Motivasi
15. Ketekunan dan Kesabaran
16. Keadilan dan Keterbukaan
17. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi

Peta kecerdasan ini sangat diperlukan guna mendorong setiap individu dalam organisasi memahami dan mengamalkan 17 butir nilai-nilai dalam etika birokrasi dimaksud, karena beberapa hal :

- a. Kode etik tidak membebaskan Sanksi Hukum atau Fisik melainkan sanksi moral, sehingga tanpa meta kecerdasan dasar akan sulit atau terdapat kegunaan untuk mengamalkan nilai-nilai tersebut.
- b. Sifat atau Nature dari Aparatur Sekretariat yang memerlukan waktu cukup panjang untuk setiap tahapannya disatu sisi dan implementasi kebijakananggaran disisi lain menambah komitmen fungsi dan tembusan-tembusan tertentu dalam menghadapi situasi yang tidak kondusif.
- c. Kriteria dan indikator pengukuran kinerja aparatur dan diseminasinya tidakmendorong aparatur untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Sumber daya manusia merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur yang merupakan ujung tombakberjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi saat ini maka harus diimbangi dengantingkat pengetahuan sumber daya manusia khususnya pada sumber daya aparaturyang memadai.

Adapun beberapa rincian secara lengkap Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang dimiliki Kecamatan Sambaliung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. **Pendidikan**

Jumlah Sumberdaya Manusia yang aktif dibawah Kantor Kecamatan Sambaliung ada 57 Orang terdiri dari 42 orang Pegawai di Kantor Kecamatan dan 15 orang pegawai di Kantor Kelurahan Pada Tahun 2025, namun pada triwulan ke-4 satu orang tenaga ASN pensiun, hingga sampai dengan 31 Desember 2025 Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan Sambaliung berjumlah 56 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1, S2 dan S3.

Berdasarkan rekapitulasi pada data kepegawaian Kecamatan Sambaliung tahun 2025 PNS 34, PPPK sebanyak 11 orang, dan Non PNS sebanyak 12 orang.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

Tabel 1.3 Pegawai Kecamatan Sambaliung Menurut Pendidikan

Pendidikan	PNS	PPPK	Non PNS	Jumlah
S3	1			
S2	1	-	-	2
S1	13	7	9	29
D3	2	1		3
D2	1			1
D1	1			1
SMA/SMEA	14	3	3	20
SMP	-			-
SD	1			1
Total	34	11	12	57

jika dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan, maka untuk pendidikan setingkat S3 sebanyak 1 orang, untuk pendidikan S2 sebanyak 1 orang, untuk pendidikan S1 sebanyak 29 orang, pendidikan D3 sebanyak 3 orang, Pendidikan D2 sebanyak 1 Orang, Pendidikan SLTA sebanyak 20 orang, dan SD sebanyak 1 orang

Tabel 1.4. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sambaliung Menurut Golongan Data Tahun 2025

No	Eksekutif	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	P3K	Non PNS	Jumlah
1	Camat	1						1
2	Sekcam	1						1
3	Sub Bag Umum & Kepegawaian		2	1	1	1	2	7
4	Sub Bag Sungram, Keuangan Dan Aset		5	-	-	-		5
5	Seksi Pemerintahan		2	4	-	1	2	9
6	Seksi Trantib		1	2	-	-	1	4
7	Seksi Pemb. Masy		2	-	-	1	3	6
8	Seksi Pelayanan Umum		2	-	-	2	2	6
9	Seksi Kessos		2	-	-	-	1	3
10	Lurah		1					1
11	Sekretariat		2	1		2		5
12	Seksi pemdes		2			2		4
13	Seksi Pelayanan Umum dan Kessos		1			1	1	3
14	Seksi Pemerintahan		1			1	-	2
	Jumlah	2	23	8	1	11	12	57



2. Golongan dan Esselon

Adapun data Sumberdaya Manusia Kecamatan Sambaliung berdasarkan jabatan dan golongan

Tabel 1.5
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Golongan (orang)

Jabatan	Golongan					Esselon			
	IV	III	II	I	Jumlah	III	IVa	IVb	Junlah
Camat	1	-	-	-	1	1	-	-	1
Sekcam	1	-	-	-	1	1	-	-	1
Kasubbag Kec.	-	2	-	-	2	-	-	2	2
Kasi Kec		5			5		5		5
.Staff Kec.		9	7	1	17				
Total	2	16	7	1	26	2	5	2	9

Dari tabel di atas diperoleh data Jumlah Golongan I terdiri dari 1 orang, Golongan II terdiri dari 7 orang, Golongan III terdiri dari 16 Orang dan Golongan IV terdiri dari 2 orang. Sementara esselon III terdiri dari 2 orang, esselon IV a Terdiri dari 5 orang dan Esselon IV b terdiri dari 2 Orang.

3. Sumberdaya Manusia berdasarkan Gender

Tabel 1.6
Sumber Daya Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Berdasarkan Gender

No.	Jabatan	PNS/ASN		NON ASN		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Camat	1				1
2	Sekcam	1				1
3	Kasubbag		2			2
4	Kasi	5				5
5	Staff PNS	11	6			17
6	Staf PPPK	4	1			5
7	Tenaga Honor			6	5	11
JUMLAH		22	9	6	5	42 Orang

Dari Tabel di atas diperoleh data Jumlah Laki-laki pegawai PNS sebanyak 22 orang dan PTT/Tenaga Non ASN Laki-laki sebanyak 6 Orang, sementara untuk Jumlah Perempuan pegawai PNS sebanyak 9 orang dan PTT/Tenaga Non ASN Perempuan sebanyak 5 orang.



Dan untuk kelurahan Sambaliung PNS laki-laki sebanyak 4 Orang, dan untuk Non PNS Laki-laki sebanyak 7 Orang, sementara untuk PNS Perempuan sebanyak 8 Orang dan Non PNS perempuan sudah tidak ada., sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1.7
Sumber Daya Kantor Kelurahan Sambaliung Kabupaten Berau Berdasarkan Gender

No.	Jabatan	PNS		PTT		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
1	Lurah	1				
2	Sekelur	0				
3	Kasi.	3				
4	Staf PNS		2	2		
5	Staf PPPK		2	4		
6	Tenaga Honor			1		
JUMLAH		4	4	7		15 orang

1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Isu Strategis adalah suatu permasalahan utama yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Sambaliung tahun yang lalu, mencermati tantang dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambaliung, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Sambaliung antara lain:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Beban kerja yang ada pada seksi di Kecamatan belum merata
3. Masih kurangnya koordinasi dalam menyingkronkan tugas pokok dan fungsi.
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.



Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik masih terbatas sehingga belum mampu mendukung pelayanan yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

5. Akuntabilitas Kinerja Organisasi Belum Maksimal

Kemampuan/kompetensi aparatur dalam penyusunan dokumen kinerja, pengelolaan dan laporan hasil kinerja, serta evaluasi kinerja berbasis SAKIP belum maksimal, tanggungjawab ini masih di bebaskan kepada bagian penyusunan program, sehingga perlu kesadaran seluruh pejabat struktural beserta aparaturnya untuk meningkatkan kinerja berbasis SAKIP, agar berdampak pada kualitas perencanaan dan pelaporan LKjIP yang tepat sasaran.

6. Masih belum terpenuhinya peralatan kerja dimasing-masing seksi, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.
7. Kurangnya kesempatan Sumberdaya aparatur yang ada dalam mengembangkan kemampuan kompetensi, minimnya Anggaran Diklat dan Pelatihan untuk seluruh pegawai Kecamatan Sambaliung.
8. Belum adanya tambahan anggaran dari pemerintah daerah untuk tenaga Outsourcing bagian Jaga malam/wakar dan petugas kebersihan serta supir, untuk menggantikan tenaga Jaga malam, petugas kebersihan dan supir yang sebelumnya telah mengikuti tes PPPK dimana mereka menempati jabatan baru yang berbeda dengan tupoksi sebelum mengikuti tes PPPK, sehingga 3 posisi penting tersebut masih kosong
9. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi dan pengawasan terhadap aparatur Kampung tentang kebijakan pemerintah Kabupaten karena kendala jarak dan belum optimalnya dukungan anggaran yang diperlukan untuk mobilitas pembinaan dan pengawasan antar 13 kampung di bawah Kecamatan Sambaliung.
10. Biaya perjalanan dinas menuju kampung dalam durasi di bawah 8 jam berupa belanja lonsum selama diperjalanan untuk pegawai yang masuk dalam team kegiatan masih perlu diakomodir, mengingat jarak tempuh kantor kecamatan dengan kampung yang dituju di lingkup Kecamatan Sambaliung saling berjauhan dan memiliki resiko transportasi yang cukup tinggi, disamping perlunya kepastian pengalokasian honor kegiatan penunjang kesejahteraan tim pelaksana kegiatan perlu untuk dipertimbangkan dalam aturan yang mengikat.
11. Sarana mobilitas transportasi roda 4 untuk kegiatan operasional perjalanan dinas



dalam daerah yang kondisinya belum optimal, dari segi jumlah maupun kondisi fisik kendaraan. Ada 13 kampung dan 1 kelurahan dengan sebaran yang luas dan jarak yang cukup berjauhan yang memerlukan dukungan sarana transportasi moda roda 4 yang layak sebagai kendaraan operasional Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ini memerlukan dukungan tim anggaran kabupaten untuk lancar mobilitas tugas dan fungsi dari Kecamatan Sambaliung.

2. Faktor-faktor internal dan eksternal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horizontal.

1. Isu-isu internal di lingkungan Kantor Camat Sambaliung antara lain :
 - a. Kualitas SDM yang kurang memadai
 - b. Kualitas data Kinerja dan sistem pelaporan belum optimal
 - c. Prasarana yang belum lengkap
 - d. Sistem kinerja yang belum optimal
 - e. Administrasi yang belum tertib.
 - f. Bimbingan dan pelatihan yang belum kontinue
 - g. Belum ada anggaran yang ditambahkan untuk tenaga Outsourcing berupa tenaga jaga malam/wakar, petugas kebersihan dan sopir, karena tenaga sebelumnya bersifat tenaga honorer dari Pemerintah Daerah sudah beralih fungsi menjadi tenaga PPPK dan PPPK paruh waktu dg jabatan yang berbeda dari sebelumnya.
2. Isu-isu strategis eksternal di lingkungan Kantor Camat Sambaliung antara lain:
 - a. Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras maupun golongan.
 - b. Perkembangan pemukiman yang belum merata dan masih belum tertata dengan baik
 - c. Kondisi lingkungan di area Kecamatan yang mulai terdampak bencana alam dan harus siaga tanggap bencana terhadap warga yang terdampak
 - d. Kerjasama antar keluarga dalam mendukung lingkungan Ramah Anak dan anak terhindar dari tayangan tonotonan adiktif masih belum punya alat ukur, hal ini diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan perilaku sejak awal agar keluarga dan anak tumbuh dalam perilaku positif.
 - e. Masih kurangnya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Penetapan Indikator Kinerja Utama/IKU dilingkungan Kecamatan Sambaliung mengacu pada Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2022-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2022-2026 dengan melibatkan Stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

2.1.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan, dan secara potensi untuk terwujud menuju kemana dan apa yang akan diwujudkan



suatu organisasi dimasa depan. Visi haruslah visi bersama yang mampu menarik, menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, harus konsisiten, tetap exis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Membangun visi bersama (scored vision) sangat diperlukan dalam menjalankan suatu organisasi agar mempunyai makna yang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan perkembangan organisasi baik secara individu, kelompok maupun secara keseluruhan organisasi, juga memberikan makna dalam mengatasi kesalahan dan kegagalan usaha, mendorong kearah keinginan dan perbaikan masa depan.

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif. Suatu visi bersifat menantang (*Challenge*) mengenai apa yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi yang ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Visi dan Misi dari Kecamatan Sambaliung merupakan turunan dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Berau tahun 2021-2026.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2021-2026 adalah:

***" Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera
dengan Sumber Daya Manusia yang Handal
untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan
Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"***

Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan sumber daya manusianya dengan tetap ditopang oleh pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan.



Untuk menghasilkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan maka hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana paradigma pembangunan di Berau harus diarahkan agar bertumpu pada struktur ekonomi yang lebih “hijau”. Selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Timur, ke depan, pengembangan ekonomi Berau tidak hanya dititik beratkan pada pengelolaan *unrenewable resources* tetapi lebih pada (transformasi) *renewable resources* yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah daerah akan terus memotori model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial.

Dimensi-dimensi yang bernilai penting dalam ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ekosistem produktif yang terjaga sebagai penyedia jasa lingkungan, pertumbuhan yang adil dan merata, ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta penurunan emisi gas rumah kaca.

b. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.

Misi Bupati dan Wakil Bupati berau Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur.
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.
4. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel



Misi ini akan memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, perlu secara terus menerus mengembangkan strategi dan kebijakan. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar senantiasa mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sebagai bagian dari pemerintahan Kabupaten Berau, Kecamatan Sambaliung merujuk pada visi Kabupaten Berau yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2022-2026 yaitu : ***"Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan"***.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh



sumberdaya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuan dan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dapat diartikan juga sebagai gambaran arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi .

Tujuan Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau yang merupakan penjabaran atau implementasi dari visi Kabupaten Berau dirumuskan sebagai berikut :

“Meningkatkan Pelayanan umum Yang Cepat dan Tepat Ke masyarakat“.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambaliung yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kampung dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Sambaliung.

b. Sasaran.

Karakteristik Sasaran dapat digambarkan dengan SMART sebagai berikut :

- **Spesific**, yang berarti jelas dan spesifik menunjukkan sasaran apa yang ingin dicapai.
- **Measurable**, yang berarti dapat diukur, sehingga memudahkan dalam penyusunan LKjIP dan evaluasinya.
- **Acceptable**, yang berarti masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.
- **Result**, yang berarti berorientasi pada pencapaian hasil.
- **Timeliness**, yang berarti dapat dicapai dalam hitungan waktu, misalnya Tahunan, semesteran maupun triwulanan.

Sasaran ditetapkan oleh Kecamatan Sambaliung adalah sebagai berikut:

“ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat “

Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sambaliung 2021-2026 adalah sebagai berikut;



“ Meningkatkan Pelayanan Umum Yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat”

Dengan Strategi “Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung”,

Dengan arah kebijakan sebagai berikut; “Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan indikator sebagai alat untuk mengukur hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan.

Tabel 2.1.2.1

Tabel Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR					
					2022	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan pelayanan umum yang cepat dan tepat ke masyarakat	Meningkatkan Kualitas pelayanan Umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84	84,10	84,20	84,25	84,30	84,50

Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau menetapkan 1 sasaran yang hendak dicapai dalam Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.2 Target Sasaran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84.30 %
			Nilai Rata-Rata LKj-Ip perangkat	Nilai	75,30 %

Sasaran tersebut akan dicapai dengan pelaksanaan 6 (Enam) program, 14 (Sepuluh) Kegiatan dan 35 (Tiga Puluh Lima) sub kegiatan pada Tahun 2025. Strategi untuk pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat pada lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan.

2.1.3 Kebijakan, Strategis, Arah Kebijakan dan program.

Kebijakan merupakan ketentuan - ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Kebijakan dapat diartikan juga sebagai suatu upaya atau tindakan untuk



mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka dan menyeluruh. Tujuan dari adanya kebijakan adalah untuk tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan dan sasaran, tujuan, visi dan misi. Arah Kebijakan dari Kecamatan Sambaliung 2021-2026 yaitu: **“Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”**

Strategi merupakan langkah-langkah sistematis yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Sambaliung secara efektif dan berkelanjutan. Strategi yang ditetapkan yaitu:

“Peningkatan kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.”

Tujuan dari adanya kebijakan adalah “Meningkatkan Pelayanan Umum Yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat.

Di bawah ini merupakan Tabel 2.3 yang merangkumkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra 2021-2026

Tabel 2.1.3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

Visi	:	Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera Dengan Sumber Daya Manusia Yang Handal Untuk Transformasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan.		
Misi	:	Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan Dan Akuntabel		
Tujuan	:	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkat Pelayan Umum Yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat		1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1. Peningkatan kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Program Kecamatan Sambaliung terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan Program prioritas terdiri dari program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan



2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Sambaliung juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Kecamatan Sambaliung tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Sambaliung Tahun 2021-2026 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambaliung yang digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Sambaliung, sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey pelayanan publik Perangkat Daerah IKM (n-1)		84,30

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.724.635.426,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 29.999.689,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.519.694.947,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 40.000.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 124.999.952,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 224.999.558,-	APBD
Jumlah		Rp. 10.664.329.572,-	APBD

2.3. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Pada dasarnya Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Kecamatan Sambaliung selama tahun 2025.



Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan *benchmark/tolak ukur* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Kondisi Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambaliung Tahun 2025 dapat digambarkan sebagai berikut dikutip berdasarkan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang terbit tahun 2025, yaitu teridentifikasinya permasalahan/Kelemahan dan kelebihan unsur layanan sebagai berikut:

1. Unsur “Waktu Penyelesaian” merupakan unsur yang mendapatkan nilai terendah yaitu 83,57 (Delapan Puluh Tiga Koma Lima tujuh).
2. Sedangkan Unsur “Biaya/Tarif” merupakan unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu 97,14 (Sembilan Puluh tujuh Koma empat belas) Karena segala urusan layanan yang ada di Kantor Kecamatan Sambaliung GRATIS/Tidak dipungut Biaya.

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan yakni “Waktu Penyelesaian” dapat dijabarkan sebagai berikut:

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan ke-3 yakni “Waktu Penyelesaian” berdasarkan dokumen SKM 2025 dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat atau pengguna layanan. Jenis layanan yang ada pada Pemerintah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merupakan layanan yang sebagian besar bersifat face to face/tatap muka secara langsung karena sesuai dengan urusan yaitu konsultasi/koordinasi.
- Ditinjau dari jenis layanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Berau Kecamatan Sambaliung, ada beberapa jenis layanan yang dapat dilakukan secara online akan tetapi unit layanan belum menyediakan fasilitas tersebut sehingga masyarakat/pengguna layanan datang secara langsung dan merasa agak kesulitan untuk mendapatkan pelayanan prima.
- Informasi terkait pelayanan yang tersedia di beberapa jenis layanan yang ada pada Pemerintah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau masih minim atau kurang informatif kepada masyarakat/pengguna layanan.
- Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat/pengguna layanan, namun fasilitas tersebut masih kurang memadai ditambah dengan minimnya biaya pemeliharaan yang ada pada Pemerintah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.



- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan.

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sambaliung adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan Sambaliung, dengan Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target pada Tahun 2025 sebesar 84,30, dan hasil capaian hingga di Desember 2025 masuk kategori BAIK yaitu 88,96%, sebagaimana Tabel dibawah ini,

Tabel 2.3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target	Capain
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitaspelayanan publik kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84.30	88,96 (Baik)

Untuk mencapai target di atas, perlu dukungan dari rencana kerja tahunan sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

Tabel 2.3.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
						Kecamatan Sambaliung						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					8.041.153.572	
	7	01				KECAMATAN					8.041.153.572	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik	100 %	6.724.635.426,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	215.000.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	65.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.715.631.114			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	5.044.881.114	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	485.750.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	149.580.000			
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	58.080.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	91.500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	290.391.492			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.999.615	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.992.157	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.999.972	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										atan, Semua Kel/D esa		
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	130.002.090			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	29.988.468	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	50.014.463	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.138.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										Semua Kel/D esa		
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 TAHUN Laporan	3.500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.638.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	9.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	119.892.130			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	90.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.992.130	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik	100 %	29.999.689			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	29.999.689			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan Laporan	29.999.689	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	100 %	896.518.947			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kampung dan Kelurahan Berkembang	1 kelurahan 13 kampung	811.519.351			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	49.999.944,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	261.519.407	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kampung dan Kelurahan Berkembang	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.999.596			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.999.596	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	40.000.000,00			
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	40.000.000,00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	124.999.952			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang terselenggara	2 Kegiatan	124.999.952			
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	1 Kegiatan 300 Orang	124.999.952	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	224.999.558			
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	224.999.558			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	49.999.770	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	49.999.788	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	X					NON URUSAN			91.998.907,00			
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			91.998.907,00			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	91.998.907			
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	41.999.748			
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.999.748	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	49.999.159			
	X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	49.999.159	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
						Kelurahan sambaliung			2.623.176.000			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.623.176.000			
	7	01				KECAMATAN			2.623.176.000			
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	2.623.176.000			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.623.176.000			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.623.176.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Sambaliung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KELURAHAN SAMBALIUNG
	J U M L A H								10.664.329.572			



2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung 2025

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84.30 %
			Nilai Rata-Rata LKj-IP perangkat	Nilai	75,30 %

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 29.999.689,-
2	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Rp. 3.519.694.947,-
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 40.000.000,-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 124.999.952,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 224.999.558,-
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota	Rp. 6.724.635.426,-
Jumlah		Rp. 10.664.329.572,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pemerintah Kecamatan Sambaliung melakukan Tindak Lanjut LHE AKIP Internal yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Berau Guna untuk menjaga mutu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada organisasi perangkat daerah Tindak lanjut Evaluasi ini diharapkan juga dapat mendorong Kecamatan Sambaliung secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanatkan dalam RPJMN/RPJMD.

Tindak Lanjut ini didasari dari hasil Evaluasi dan Analis Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung. Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2024 Kecamatan Sambaliung berdasarkan surat tugas Inspektur Nomor : 700/065/itkab-was/IV/2025 terhadap LKjIP tahun 2024 kecamatan Sambaliung terhadap kinerjanya adalah sebesar 53.80 termasuk dalam katagori ‘CC’ dengan interprestasi “Cukup Memadai” sebagaimana uraian berikut:

Tabel 3.1.1 Kategori Penilaian

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	15,30
3	Pelaporan Kinerja	15	11,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	53,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Sebagaimana dengan hasil evaluasi di atas, telah dilakukan tindak lanjut oleh Kecamatan Sambaliung sebagai bentuk perbaikan untuk tahun selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.1. 2. Tindak Lanjut Kecamatan Sambaliung atas Hasil Evaluasi LKJIP tahun sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	No
1	Membuat laporan monitoring evaluasi per triwulan yang di tandatangani setiap unit kerja/ bidang, dan di dalamnya memberikan informasi target kinerja, realisasi, faktor hambatan dan rekomendasi	Penyusunan Laporan dari kinerja masing-masing seksi sudah berlangsung walaupun kendalanya SDM penyusun laporan hasil dari berkegiatan masih kurang dan perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis yang kontinu.	1
2	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar peningkatan kinerja pegawai dan organisasi, termasuk pemberian reward and punishment	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berjenjang dengan basis teknologi melalui E-kinerja, sehingga apresiasi atasan dalam menilai dapat terlihat berisi reward ataupun catatan perbaikan sebelum melakukan funishmen.	2
3	Melakukan reviu atas Laporan Kinerja sebelum diformalkan, sehingga terdapat bukti bahwa dokumen Laporan Kinerja telah direviu.	Reviu laporan kinerja sudah berjalan dengan sebagaimana terlihat dalam website: E-SAKIP REVIU  https://esr.menpan.go.id/index.php/home	3
4	Dokumen laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	Dokumen Laporan Kinerja sudah disusun yang menggambarkan realisasi kinerja anggaran per triwulan,	4



		sebagai pendukung utama sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung.	
5	Dokumen Laporan Kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	Laporan Kinerja 2025 sudah disusun yang menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana terdapat dalam BAB III dokumen LKJIP Kecamatan Sambaliung Tahun 2025.	5
6	Laporan kinerja menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja capaian nasional	Dalam dokumen LKJIP Tahun 2025 pada Bab III sudah dimasukkan data realisasi kinerja capaian nasional dan membandingkan capaian kinerja Kecamatan Sambaliung, menunjukkan hal yang positif dimana terdapat belanja negara yang optimal dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.	6
7	Laporan Kinerja menginformasikan besaran efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Kecamatan Sambaliung menjalankan upaya peningkatan efisiensi dalam mencapai sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan melalui belanja anggaran baik barang maupun jasa memiliki ketepatan manfaat dan tujuan, yang menunjang pencapaian sasaran kinerja Kecamatan Sambaliung, sebagaimana jenis belanja yang	7



		terdapat dalam rencana kerja anggaran dan dokumen DPA Perubahan Tahun 2025, terdapat pengubahan anggaran pada Sub Kegiatan pemilihan kepala kampung, saat tahun berjalan di 2025 dinyatakan kegiatan tersebut tidak diselenggarakan, sehingga pada jadwal perubahan ABT 2025, anggaran tersebut diajukan untuk nihil, dan terlihat pada DPA Perubahan di 2025 nilai besaran anggarannya sudah tidak tercantum, namun penambahan anggaran pada perubahan disesuaikan dengan kebutuhan kinerja Kecamatan Sambaliung hingga akhir 2025, data efisiensi ada tercantum dalam Bab III	
8	Membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Menyusun Pedoman evaluasi Akuntabilitas 2025.	8
9	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk jangka pendek sudah dilakukan dan laporan realisasi per bulan sudah pula di upload dalam aplikasi SMEP Online yang dimobilisasi oleh Setda Kabupaten Berau. Adapun yang dilakukan per triwulan, sedang berjalan, meskipun kendalanya SDM pengadministrasian dan	9



		pelaporan masih lemah dan perlu penguatan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan/ pengawasan secara kontinu.	
--	--	---	--

Berdasarkan hasil rekomendasi dalam LHE dari Inspektorat di atas, secara garis besar Kecamatan Sambaliung melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Mendorong segenap jajaran pada Kecamatan Sambaliung agar melakukan penguatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja Kecamatan Sambaliung.
2. Mendokumentasikan seluruh proses manajemen terkait upaya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
3. Mengajukan dukungan anggaran dalam peningkatan SDM ASN di lingkungan Kecamatan Sambaliung dan juga meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana administrasi Kecamatan Sambaliung.
4. Camat Sambaliung untuk menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan terhadap:
 - a. Perencanaan Kerja
 - b. Pengukuran Kinerja
 - c. Pelaporan Kinerja
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Kecamatan Sambaliung berkomitmen untuk lebih meningkatkan Capaian Kinerja di tahun 2025 yang mendukung sasaran dari RPJMD Kabupaten Berau dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Berau Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Pada realisasi kinerja Anggaran 2025, sudah dilaksanakan Evaluasi & monitoring pada capaian kinerja Kecamatan Sambaliung, dimana hasil capaian realisasi hingga akhir Desember 6 Program Utama dalam Rencana Kerja Kecamatan Sambaliung memperoleh capaian realisasi fisik keuangan 92,49 % dari total anggaran yang tersedia, dari Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM) mencapai 88,96 persen melampaui target capaian yang direncanakan



pada angka 84,30%, sehingga capaian ini menunjukkan kategori Baik (pada Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambaliung 2025).

Tabel 3.1.3. Tabel Capaian Realisasi Akhir Anggaran TA 2025

Kode	Program	Anggaran	Capaian	Fisik (%)	Keuangan (%)	Ket
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.	Rp. 8.623.366.161,-	Rp. 7.155.181.400,-	98,76	82,97	Sangat Tinggi
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 18.009.357,-	Rp. 15.806.986,-	100	87,77	Sangat Tinggi
7.01.03	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Rp. 3.872.503.032,-	Rp. 3.730.639.785,-	100	96,34	Sangat Tinggi
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.	Rp. 96.200.000,-	Rp. 68.838.744,-	83,64	71,56	Tinggi
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.	Rp. 122.453.022,-	Rp. 76.933.000,-	65	62,83	Rendah
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	Rp. 153.268.258,-	Rp. 128.407.732,-	100	83,78	Sangat Tinggi
Jumlah		Rp.12.885.800.010,-	Rp. 11.175.808.087,-	92,49	86,73	Sangat Tinggi

Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan. Dalam upaya melakukan peningkatan capaian kinerja Akuntabilitas di atas, terdapat masalah-masalah atau kendala yang dapat mempengaruhi waktu penyusunan laporan evaluasi dan revidi, diantaranya sebagai berikut:

1. Masih belum ada pelatihan teknik penilaian dan pengukuran kelengkapan dokumen SAKIP dari tim AKIP Kabupaten kepada tim penyusun penyusunan dokumen kelengkapan SAKIP di Kecamatan
2. Masih belum meratanya Pelatihan dan Bimbingan Teknis yang kontinu bagi seluruh SDM di Kecamatan, karena dana terbatas yang ditetapkan dalam APBD
3. Pembagian kinerja yang masih belum merata dan masih adanya tenaga kerja dengan kemampuan pengadministrasian yang rendah dalam mengadministrasikan hasil kegiatan, sehingga pekerjaan seringkali tertumpuk pada satu orang untuk menyelesaikan laporan kegiatan, sehingga realisasi dokumen laporan kegiatan jadi tertunda dan perlu waktu lebih banyak.
4. Masih adanya asumsi yang disampaikan staf, bahwa Kecamatan merupakan tempat kerja bebas dari administrasi dan lebih santai, sehingga ini cukup membebani kinerja kecamatan di saat bagian pengumpul data meminta hasil laporan pekerjaan namun respon/SDM masih lambat.



Meskipun terdapat kendala di atas, Kecamatan Sambaliung pada tahun berjalan di 2025, dengan segala kendala yang ada berusaha melengkapi administrasi pendukung kelengkapan penilaian SAKIP sebagai upaya perbaikan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan, dapat meningkat dari hasil tahun sebelumnya, dimana fokus perbaikan terkait dengan kelengkapan Pelaporan Kegiatan Kinerja Per Tri Wulan sebagai alat ukur dari Indikator Kinerja Utama yang sudah ditetapkan.

3.2 Capaian Kinerja Perangkat Daerah

A. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Diperoleh dari data Dokumen SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) tahun 2025 Kecamatan Sambaliung, capaian sasaran Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sambaliung yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat", menunjukkan hasil positif karena terjadi peningkatan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025, yaitu sebesar 88,96 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan telah berada pada kategori Baik (B). Realisasi ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 84,30 dengan tingkat capaian sebesar 105,5 %, yang mencerminkan peningkatan kualitas layanan yang konsisten dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan, optimalisasi standar operasional prosedur (SOP), serta pemanfaatan sarana prasarana pelayanan yang semakin memadai. Selain itu, adanya komitmen dalam penerapan prinsip pelayanan prima dan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tingkat kepuasan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kecepatan pelayanan pada jam-jam tertentu serta konsistensi kualitas pelayanan antar petugas. Oleh karena itu, langkah perbaikan yang akan dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem antrian, serta penguatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pelayanan.

Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik Kecamatan telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat, serta menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.



B. Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024

Selanjutnya sasaran tambahan adalah “Capaian Nilai AKIP” berupa penilaian SAKIP/LAKIP yang dilakukan secara internal dan juga oleh Inspektorat mengeluarkan hasil review.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dilaksanakan terhadap empat komponen utama yakni:

- Perencanaan Kinerja,
- Pengukuran Kinerja,
- Pelaporan Kinerja, dan
- Evaluasi Kinerja Internal.

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kriteria. Subkomponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Aspek Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.



Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.2.2 Aspek Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A	90	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Tabel 3.2.3 Predikat dan Interpretasi

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai >80-90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
BB (Nilai >70-80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.



Predikat	Interpretasi
B (Nilai >60-70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
CC (Nilai >50-60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai >30-50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan maendasar di level pusat.
D (Nilai >0-30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan hasil evaluasi (Lampiran KKE AKIP) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau memperoleh tingkat akuntabilitas dengan nilai 53.80 dengan predikat CC termasuk dalam kategori "Memadai". Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai atas penilaian subkomponen yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.4

Nilai dan Predikat AKIP 2024 Kec Sambaliung dari Inspektorat

NO	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30	15,30
3	Pelaporan Kinerja	15	11,40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	2,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	53,80
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC

Dalam Point Penilaian yang rendah terdapat pada komponen kreteria “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal” yang bobotnya 25, mendapat nilai 2,50. Hal ini disebabkan kegiatan **terlaksana** sebagaimana rencana kerja, pelaporan kinerjanya dilaksanakan, namun dalam proses **analisa pengukuran** bukti pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal di lingkup kecamatan masih belum maksimal, ada yang terlewatkan untuk **ditandai** bahwa sudah dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal di Tahun 2024, seringkali aktifitas rapat evaluasi dilakukan pimpinan



secara mendadak tanpa didahului undangan resmi yang menjadi bagian unsur penting rapat evaluasi akuntabilitas, sehingga saat permintaan rapat datang bersamaan dengan penyelesaian pekerjaan dari perencanaan maupun keuangan yang selalu mengejar timing waktu/dibatasi waktu dalam penyelesaiannya.

Untuk di Tahun 2025, agenda Evaluasi akuntabilitas dilakukan melalui laporan kinerja baik secara bulanan maupun per triwulan dimana hasil realisasi pekerjaan terinput pada sistem Penatausahaan SIPD-RI 2025, setelah dokumen SPJ dan Kelengkapannya secara fisik selesai memperoleh verifikasi mulai dari PPTK yang dibantu “Pembantu PPTK” hingga ke PPK-SKPD dan lanjut untuk di tandatangani oleh PA/Pengguna Anggaran, demi menjaga sistem akuntabilitas penggunaan Anggaran Pada DPA dan DPPA 2025 di Kecamatan Sambaliung, selain itu juga ada evaluasi per tri wulan terhadap capaian kinerja anggaran Kecamatan Sambaliung melalui rapat internal dan juga melalui grup Evaluasi RKPD, dokumen SMEP Online yang menjadi dasar dari agenda Forum Konsultasi Publik dalam Evaluasi Capaian Realisasi Kegiatan Kabupaten Berau per tri wulan SKPD. Diharapkan dengan pola ini, pengukuran bagian “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal” dapat meningkat seperti semula di tahun 2020, 2021, 2022 di Kecamatan Sambaliung.

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Sambaliung.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja meliputi uraian keterkaitan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat daerah Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026. Pelaporan dan pengukuran pencapaian kinerja ini dilakukan sebagai bahan informasi sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan.

Adapun kategori dalam penilaian evaluasi Laporan Capaian Kinerja Instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

3.3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Pengukuran capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Sambaliung, penilaian sasaran meliputi:

- I. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat
 - II. Meningkatkan Nilai Evaluasi Akip Kec.Sambaliung
- a) Sasaran I : Kinerja Kecamatan Sambaliung Tahun 2025.



Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat” berdasarkan data dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Sambaliung tahun 2021-2026.

Tabel 3.3.1.1 Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung 2021-2026

VISI	:	Mewujudkan Berau Maju Dan Sejahtera Dengan Sumber Daya Manusia Yang Handal Untuk Transformasi Ekonomi Dlam Pengelolaan Sumberdaya Alam Secara Berkelanjutan.		
MISI	:	Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan Dan Akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Pelayanan Umum Yang Cepat Dan Tepat Ke Masyarakat.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.	Peningkatan kualitas Pelayanan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	

Tabel 3.3.1.2. Target Sasaran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	84,30 %
			Nilai Rata-Rata LKj-Ip perangkat	Nilai	75,30 %

Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 terlihat pada Tabel berikut di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.3.1.3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2025	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai IKM Kecamatan Sambaliung	Nilai	88,96	84,30	88,96	105,5%	85,20 (Baik)

Analisis Capaian Kinerja/atau Indikator Kinerja Utama (IKU): “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat”, dari Tabel di atas terbaca bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sambaliung masuk dalam kategori Baik yaitu dengan nilai mencapai 88,96



(Kategori Baik) melampaui target yang direncanakan di angka Indeks 84,30. Capaian tersebut menyatakan masyarakat puas terhadap Pelayanan Umum yang dilakukan aparatur di Kecamatan Sambaliung.

Capaian di atas tentu juga punya tantangan tersendiri berupa kendala ataupun masalah dalam masa berjalannya survei kepuasan masyarakat di tahun 2025, yang antara lain:

1. Karakteristik responden memiliki pendidikan variatif, dan usia yang berbeda dengan karakter yang tidak semuanya mampu membangun komunikasi positif.
2. Sarana dan prasarana penanganan pengaduan publik sudah memadai melalui WhatsApp yang tersedia di bagian Pelayanan Umum, namun perlu ketelitian memilah aduan ataukah konfirmasi untuk mendapatkan layanan, dan masyarakat masih belum memaksimalkan layanan tersebut.
3. SDM berupa kompetensi pelayanan publik masih perlu di tingkatkan. Strategi upaya pemecahan masalah sebagai berikut:
 1. Petugas pelayanan publik yang lebih memiliki kemampuan komunikasi, responsif dan kesabaran dalam menghadapi responden, untuk memastikan survei berjalan sebagaimana mestinya.
 2. Perlu sosialisasi aktif kepada penerima layanan di Kecamatan Sambaliung untuk memanfaatkan “form pengaduan” baik melalui lembar manual ataupun fasilitas WhatsApp.
 3. Perlu adanya pendampingan dan bimbingan teknis/pelatihan terhadap petugas pelayanan publik.
- b) Membandingkan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023, dan tahun 2024

Data berikut adalah data pembanding antara target dan realisasi kinerja AKIP tahun 2025, dengan tahun sebelumnya dalam rangka pengukuran capaian kinerja organisasi pada Kecamatan Sambaliung, penilaian sasaran meliputi:

Sasaran AKIP : Meningkatkan Nilai Evaluasi AKIP Kec.Sambaliung

Target dan capaian yang berhasil dilakukan Kecamatan Sambaliung dapat terlihat pada Tabel perbandingan di bawah ini:



Tabel 3.3.1.4 Tabel Perbandingan Sasaran I

Target dan Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Sambaliung 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat (Satuan Nilai: Indeks Kepuasan Masyarakat)						Target Akhir Renstra
	Tahun	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Target	84	84,10	84,20	84,25	84,30	84,50	84,50
2	Capaian	84,14	84,15	84,16	85,16	88,96	-	-

Dari Tabel 3.3.1.4 Perbandingan Sasaran I di atas dapat dilihat peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan dari tahun ke tahun meningkat, sehingga dapat dinyatakan Kecamatan Sambaliung sudah menjalankan perbaikan dari tahun ke tahun secara signifikan.

Tabel 3.3.1.5 Tabel Perbandingan Sasaran II
Hasil Penilaian AKIP 2020 – 2024 Kecamatan Sambaliung

Sasaran II: “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan”							
Indikator Kinerja	Satuan	Target					
		Th 2021	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026
Target	Nilai	75	75	75,10	75,20	75,30	75,35
Capaian		74,67	-	58,86	53,80	-	-
Kategori capaian		(A) Sangat Baik	-	(CC) Cukup Memadai	CC (Cukup Memadai)	-	-

Berdasarkan Hasil Evaluasi LKjIP tahun 2024 Kecamatan Sambaliung berdasarkan surat tugas Inspektur Nomor : 700/065/itkab-was/IV/2025 terhadap LKjIP tahun 2024 kecamatan Sambaliung memperoleh tingkat akuntabilitas dengan nilai **53.80** dengan predikat **CC** termasuk dalam kategori "**Memadai**", sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3.1.6 berikut ini:

Tabel 3.3.1.6 Nilai dan Predikat AKIP Tahun 2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.60
2	Pengukuran Kinerja	30.00	15.30
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.40
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	2.50
Total Nilai		100.00	53.80
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC

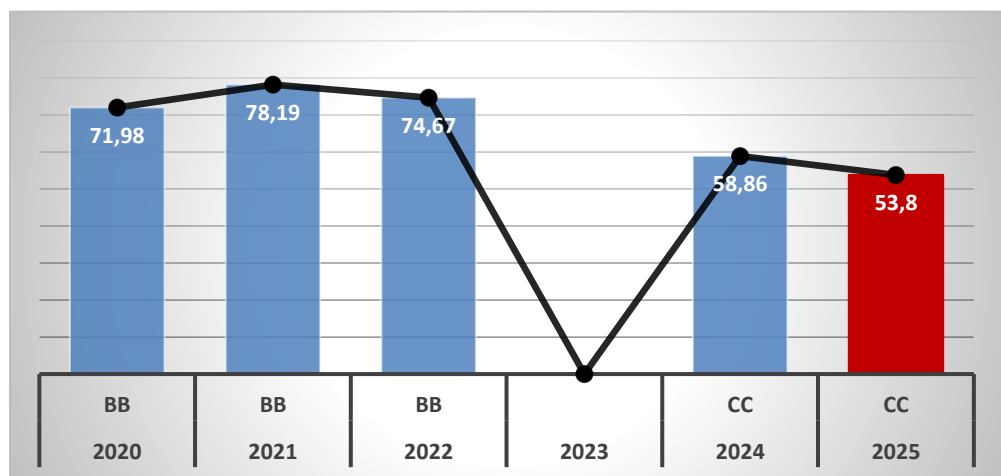
Item yang mendapat perhatian khusus pada “Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal” dimana dinyatakan hasil evaluasi terhadap komponen evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal diperoleh nilai sebesar 2.50 dari bobot



sebesar 25.00.

Dari Tabel di Atas terlihat ada penurunan dari penilaian AKIP dari Tahun AKIP 2023 ke Tahun AKIP 2024 yang dinilai Tahun 2025, hal ini terlihat pada ulasan pada perbandingan capaian AKIP Kecamatan Sambaliung dibawah ini.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau pada tahun 2025 dan selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik diatas berdasarkan data hasil evaluasi selama 5 tahun terakhir antara lain:

1. Berdasarkan LHE Nomor 700/110/LHE-LKJIP/WIL.II/X/2024 pada tahun 2024 untuk Nilai dan Predikat AKIP 2023 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau memperoleh tingkat akuntabilitas dengan predikat “CC” dengan nilai capaian sebesar **58.86**. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai atas penilaian sub komponen yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1.7 Nilai dan Predikat AKIP 2023

No	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil
1	Perencanaan Kinerja	30.00	21.45
2	Pengukuran Kinerja	30.00	21.80
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.88
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25.00	0.00
Total Nilai		100	58.86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC



2. Penilaian SAKIP tahun 2023 untuk penilaian AKIP 2022 hanya dilakukan sampling ke beberapa Perangkat Daerah. Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tidak termasuk dalam sampling, sehingga tidak diketahui nilai dan predikat AKIP tahun 2022.
3. Berdasarkan LHE Nomor 700/21/LHE-LAKIP/WIL.II/XII/2022 pada tahun 2022 untuk AKIP Tahun 2021 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau memperoleh tingkat akuntabilitas dengan predikat **“BB”** dengan nilai capaian sebesar **74.67**. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai atas penilaian subkomponen yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1.8 Tabel Nilai dan Predikat AKIP Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.70
2	Pengukuran Kinerja	25.00	19.69
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.85
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	10.00	5.06
5	Pencapaian Sasaran Kinerja	20.00	9.38
Total Nilai		100	74.67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

4. Berdasarkan LHE Nomor 700/22/LHE-LKJIP/Itkab.Wil.II/VIII/2021 pada tahun 2021 untuk AKIP tahun 2020 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau memperoleh tingkat akuntabilitas dengan predikat **“BB”** dengan nilai capaian sebesar **78.19**. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai atas penilaian subkomponen yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1.9 Tabel Nilai dan Predikat AKIP Tahun 2020

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil
1	Perencanaan Kinerja	30.00	27.68
2	Pengukuran Kinerja	25.00	19.38
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.36
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	10.00	4.27
5	Pencapaian Sasaran Kinerja	20.00	14.50
Total Nilai		100	78.19
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB



5. Berdasarkan LHE Nomor 700/45/LHE-LAKIP/Wil.II/XI/2020 pada tahun 2020 untuk AKIP tahun 2019 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau memperoleh tingkat akuntabilitas dengan predikat **“BB”** dengan nilai capaian sebesar **71.98**. Nilai tersebut merupakan akumulasi nilai atas penilaian subkomponen yang secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1.10 Tabel Nilai dan Predikat AKIP Tahun 2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Hasil
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.07
2	Pengukuran Kinerja	25.00	17.81
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11.34
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	10.00	4.27
5	Pencapaian Sasaran Kinerja	20.00	14.50
Total Nilai		100	71.98
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Berikut ini disajikan data pembandingan dari anggaran pendukung sasaran kinerja yang memuat target realisasi kinerja anggaran dan capaian kinerja anggaran Kecamatan Sambaliung dari Tahun 2020 hingga tahun 2025.

Tabel 3.3.1.11. Pembandingan Target & Capaian Realisasi Kinerja Anggaran dalam 5 Tahun

No	Sasaran Strategis I				
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan				
	Sasaran Strategis II				
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan				
Membandingkan Target & Capaian Realisasi Kinerja Anggaran					
No	Tahun	Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2025	12.885.800.010	95 %	11.175.808.087	92,49
2	2024	11.727.589.125	95 %	11.160.063.435	95,16
3	2023	9.150.045.979	95%	8.758.020.961	95,72
4	2022	10.057.382.616	95%	9.276.686.755	92,24
5	2021	7.616.434.712	95%	6.901.252.919	90,61
6	2020	7.867.641.400	95%	7.204.124.605	91,56



Dari tabel di atas terlihat adanya optimalisasi penggunaan anggaran APBD yang dijalankan kecamatan dalam mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) juga semakin membaik, sebagaimana yang menjadi target pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Sambaliung Tahun 2025 yaitu Pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat 84,30 dalam Pagu Anggaran di DPA Murni 2025 sebesar Rp. 10.664.329.572, 00, dengan hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target yaitu 88,96 dengan kategori IKM BAIK. Dalam hal ini realisasi anggaran juga harus di dukung oleh SDM yang baik dalam menjalankan teknis kegiatan dan penjagaan dalam pelaporan hasil kinerja anggaran melalui penyusunan SPJ yang taat aturan dan akuntabel.

3.3.2. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.3.2 dibawah ini menunjukkan Jumlah Pagu Anggaran dari Tahun 2022, Tahun 2023, 2024 dan tahun 2025 beserta Target yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan periode 2021-2026, terdapat peningkatan pagu anggaran dari tahun ke tahun, dan target realisasi diharapkan 100% namun dalam realisasi capaiannya terlihat belum mencapai 100%. Metode Pengukuran Kinerja yang di gunakan Kecamatan Sambaliung adalah membanding realisasi rencana yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan tingginya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja adapun rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

Tabel 3.3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kecamatan Sambaliung

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	PAGU ANGGARAN TAHUN 2022 (RP)	Target	REALISASI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2023 (RP)	Target	REALISASI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2024 (RP)	Target	REALISASI		PAGU ANGGARAN TAHUN 2025 (RP) KEUANGAN (Rp)	Target	REALISASI	
					FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN			FISIK	KEUANGAN				
					%	(%)			(Rp)	100%			(%)	(Rp)	100%		(%)	(Rp)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Rp 5,767,925,182	100%	89.12	Rp 5,140,160,316	Rp 5,533,726,199	100%	95.29	Rp 5,273,205,866	Rp 7,503,232,525	100%	94.26	Rp 7,072,774,346	Rp. 8,623,366,161	100 %	98,76 %	Rp. 7,155,181,840
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 37,395,000	100%	18.81	Rp 7,035,000	Rp 138,799,000	100%	85.28	Rp 118,374,480	Rp 227,514,000	100%	85.61	Rp 194,773,680	Rp. 96,612,710	100%	100%	Rp. 81,562,182
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Rp 24,965,000	2 dokume n	28.18	Rp 7,035,000	Rp 25,169,000	2 dokumen	82.90	Rp 20,864,000	Rp 45,000,000	2 dokumen	78.62	Rp 35,378,320	Rp. 41,147,900	8 Dokum en	100%	Rp. 32,955,600
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun	Rp 12,430,000	5 dokume n	-	Rp -	Rp 12,430,000	5 dokumen	76.43	Rp 9,500,000	Rp 32,430,000	5 dokumen	81.43	Rp 26,407,560	Rp. 29,249,000	8 Dokum en	100%	Rp. 247,747,960
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Rp -	Rp -	-	-	Rp 101,200,000	1 kegiatan	86.97	Rp 88,010,480	Rp 150,084,000	1 kegiatan	88.61	Rp 132,987,800	Rp. 26,215,810	8 Dokum en	100%	Rp. 23,858,622
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp 4,965,329,582	100%	91.17	Rp 4,526,990,872	Rp 4,798,629,199	100%	96.44	Rp 4,627,866,209	Rp 6,246,032,125	100%	96.23	Rp 6,010,343,315	Rp. 7,530,558,915	100%	100%	Rp. 6,165,245,906
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	Rp 4,308,505,710	12 bulan	90.57	Rp 3,902,418,268	Rp 4,161,632,759	12 bulan	96.06	Rp 3,997,788,305	Rp 5,470,256,125	12 bulan	95.83	Rp 5,242,214,132	Rp. 6,911,904,174	12 Bulan	100%	Rp. 5,592,993,541
7.01.01.2.02.0002	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang disediakan untuk Pelaksanaan tugas ASN	Rp 529,655,872	12 bulan	97.08	Rp 514,196,604	Rp 521,200,440	12 bulan	99.32	Rp 517,676,904	Rp 573,900,000	12 bulan	98.83	Rp 567,202,183	Rp. 313,663,141	14 Dokum en	100%	Rp. 297,040,365
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	Rp 127,168,000	12 bulan	86.80	Rp 110,376,000	Rp 115,796,000	12 bulan	97.07	Rp 112,401,000	Rp 201,876,000	12 bulan	99.53	Rp 200,927,000	Rp. 304,991,600	12 Dokum en	100%	Rp. 275,392,000
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,080,000	100 %		Rp. 197,461,236
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Berserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 62,580,000	45 Paket	100%	Rp. 62,850,000
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 141,500,000	10 Orang	100%	Rp. 134,881,236
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp 486,067,700	100%	####	Rp 408,201,156	Rp 372,306,000	100%	92.49	Rp 344,363,689	Rp 502,495,800	100%	88.21	Rp 443,238,401	Rp. 240,742,444	100 %		Rp. 219,323,477



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penerangan bangunan kantor Yang disediakan	Rp 2,733,000	12 bulan	100.00	Rp 2,733,000	Rp 2,990,000	12 bulan	99.67	Rp 2,980,000	Rp 2,975,900	12 bulan	89.55	Rp 2,665,000	Rp. 2,999,615	15 Paket	100%	Rp. 2,628,900
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Rp 128,277,500	12 bulan	92.07	Rp 118,110,000	Rp 74,406,000	12 bulan	98.45	Rp 73,256,000	Rp 112,772,900	12 bulan	98.56	Rp 111,152,800	Rp. 39,655,700	12 Paket	100%	Rp. 31,324,897
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan												Rp 153,002,000	Rp. 7,992,157	12 Paket	100%	Rp. 7,017,500
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kegiatan disediakannya bahan logistik kantor	Rp 156,227,200	12 bulan	75.56	Rp 118,045,900	Rp 127,540,000	12 bulan	84.80	Rp 108,155,000	Rp 196,747,000	12 bulan	77.77	Rp 13,398,000	Rp. 75,015,000	12 Paket	100%	Rp. 72,676,000
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kegiatan disediakannya Bahan Cetak dan Penggandaan	Rp 7,000,000	2 jenis	####	Rp 6,783,000	Rp 7,370,000	2 jenis	100.00	Rp 7,370,000	Rp 16,000,000	2 jenis	83.74	Rp 1,920,000	Rp. 7,999,972	2 Paket	100%	Rp.2,951,800
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan disediakannya bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Rp 5,000,000	2 jenis	69.60	Rp 3,480,000	Rp 5,000,000	12 bulan	67.10	Rp 3,355,000	Rp 4,000,000	12 bulan	48.00	Rp 161,100,601	Rp. 5,000,000	12 Dokumen	100%	Rp. 1,920,000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan rakor dan konsultasi skpd yang dilaksanakan	Rp 156,830,000	12 bulan	####	Rp 129,049,256	Rp 155,000,000	12 bulan	96.29	Rp 149,247,689	Rp 170,000,000	12 bulan	94.77	Rp 161,100,601	Rp. 102,080,000	12 Laporan	100%	Rp. 100,804,380
7.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada DKPD	jumlah sistem berbasis elektronik pada SKPD	Rp 30,000,000	1 paket	100.00	Rp 30,000,000	;	-	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah														Rp. 238,735,635	100 %		Rp. 238,473,000
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														Rp. 29,988,468	12 unit	100%	Rp. 29,988,000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														Rp. 158,748,008	24 Unit	100%	Rp. 158,497,000
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana														Rp. 49,999,159	4 Unit	100%	Rp. 49,988,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 93,483,000	100%	####	Rp 82,714,073	Rp 113,232,000	100%	78.78	Rp 89,203,090	Rp 123,629,000	100%	86.77	Rp 107,270,940	Rp. 147,994,327	100 %		Rp. 139,375,718
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	Rp 3,483,000	12 bulan	67.47	Rp 2,350,000	Rp 2,996,000	12 bulan	99.80	Rp 2,990,000	Rp 5,320,000	12 bulan	71.43	Rp 3,800,000	Rp. 3,500,000	1 Tahun	100%	Rp. 2,700,000
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jumlah bulan disediakannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Rp 90,000,000	12 bulan	####	Rp 80,364,073	Rp 95,300,000	12 bulan	85.32	Rp 81,314,090	Rp 101,840,000	12 bulan	90.83	Rp 92,497,940	Rp. 135,494,327	12 Bulan	100%	Rp. 127,825,718
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki		0	-		Rp 14,936,000	12 bulan	32.80	Rp 4,899,000	Rp 16,469,000	12 bulan	66.63	Rp 10,973,000	Rp. 9,000,000	10 Unit	100%	Rp. 8,850,000
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp 185,649,900	100%	####	Rp 115,219,215	Rp 110,760,000	100%	84.33	Rp 93,398,398	Rp 403,561,600	100%	78.59	Rp 317,148,010	Rp. 164,642,130	100%	91,33	Rp. 113,560,321



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Rp 122,515,900	12 bulan	46.55	Rp 57,035,215	Rp 93,784,000	12 bulan	81.49	Rp 76,422,398	Rp 173,566,000	12 bulan	74.10	Rp 128,604,010	Rp. 130,000,000	6 Unit	100%	Rp. 94,189,321
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 8,150,000	12 bulan	####	Rp 3,200,000	Rp 7,000,000	12 bulan	100.00	Rp 7,000,000	Rp 11,500,000	12 bulan	61.22	Rp 7,040,000	Rp. 9,650,000	7 unit	100%	Rp. 9,240,000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	Rp 54,984,000	12 bulan	100.00	Rp 54,984,000	Rp 9,976,000	12 bulan	100.00	Rp 9,976,000	Rp 218,495,600	12 bulan	83.07	Rp 181,504,000	Rp. 24,992,130	1 unit	74 %	Rp. 10,131,000
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik														Rp. 18,009,537	100 %	100%	Rp. 15,806,986
7.01.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan														Rp. 18,009,537	100%	100%	Rp. 15,806,986
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 18,009,537	12 Bulan	100%	Rp. 15,806,986
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	Rp 2,407,968,184	100%		Rp 2,350,070,304	Rp 865,834,880	100%	96.43	Rp 834,939,264	Rp 1,032,737,000	100%	94.33	Rp 974,175,899	Rp. 802,167,975	100 %	100%	Rp. 690,639,012
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Rp 2,407,968,184	100%		Rp 2,350,070,304	Rp 865,834,880	100%	96.43	Rp 834,939,264	Rp 1,032,737,000	100%	94.33	Rp 974,175,899	Rp. 735,255,079	100 %	100%	Rp. 630,949,284
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 49,422,944	1 Kel 13 Kampu ng	100%	Rp. 42,255,160
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah bulan dibayarkannya honor pejuang sigap sejahtera	Rp 653,145,184	12 bulan	97.90	Rp 639,435,804	Rp 707,647,880	12 bulan	98.32	Rp 695,746,264	Rp 718,750,000	12 bulan	93.66	Rp 673,171,800	Rp. 462,000,000	12 Dokum en	100%	Rp. 387,726,024
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Rp 1,754,823,000	12 bulan	97.48	Rp 1,710,634,500	Rp 158,187,000	12 bulan	87.99	Rp 139,193,000	Rp 313,987,000	12 bulan	95.87	Rp 301,004,099	Rp 223,832,135	3 Lapora n	100%	Rp. 197,968,100
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp 1,770,577,600	100%	98.85	Rp 1,750,132,335	Rp 2,589,254,900	100%	98.65	Rp 2,554,409,711	Rp 3,004,987,600	100%	99.39	Rp 2,986,524,806	Rp. 66,912,896	100 %	100%	Rp. 59,689,728
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rp. 66,912,896	1 Lembag a Kemasy arakata n	100%	Rp. 59,689,728



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Rp 105,849,550	100%		Rp 31,273,800	Rp 64,982,000	100%	31.87	Rp 20,712,168	Rp 65,484,000	100%	80.08	Rp 52,440,384	Rp. 96,200,000	100 %	83,64 %	Rp. 68,838,744
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	Rp 105,849,550	100%		Rp 31,273,800	Rp 64,982,000	100%	31.87	Rp 20,712,168	Rp 65,484,000	100%	80.08	Rp 52,440,384	Rp. 96,200,000	100%	83,64 %	Rp. 68,838,744
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan	Rp 105,849,550	12 bulan	29.55	Rp 31,273,800	Rp 64,982,000	12 bulan	31.87	Rp 20,712,168	Rp 65,484,000	12 bulan	80.08	Rp 52,440,384	Rp. 96,200,000	1 Laporan	83,64 %	Rp. 68,838,744
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Rp 5,062,100	100%	99.76	Rp 5,050,000	Rp 24,916,000	100%	96.05	Rp 23,932,000	Rp 121,148,000	100%	61.20	Rp 74,148,000	Rp. 122,453,022	100 %	65%	Rp. 76,933,000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Rp 5,062,100	100%	99.76	Rp 5,050,000	Rp 24,916,000	100%	96.05	Rp 23,932,000	Rp 121,148,000	100%	61.20	Rp 74,148,000	Rp. 122,453,022	100%	65%	Rp. 76,933,000
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan	Rp 5,062,100	1 kegiatan	99.76	Rp 5,050,000	Rp 24,916,000	1 kegiatan	96.05	Rp 23,932,000	Rp 121,148,000	1 kegiatan	61.20	Rp 74,148,000	Rp. 122,453,022	1 Kegiatan	65%	Rp. 76,933,000
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Rp -	100%	-		Rp 71,332,000	100%	71.25	Rp 50,821,952	Rp -	100%	0.00	Rp -	Rp. 153,268,258	100 %	100%	Rp. 128,407,732
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp -	100%	-	0	Rp 71,332,000	100%	71.25	Rp 50,821,952	Rp -	100%	0.00	Rp -	Rp. 153,268,258	100 %	100%	Rp. 128,407,732
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														Rp. 103,999,700	3 Dokumen	100%	Rp. 92,256,394
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa	Rp -	-	-	0	Rp 71,332,000	6 kampung	71.25	Rp 50,821,952	Rp -	2 kampung	0.00	Rp -	Rp. 19,400,770	1 Dokumen	100%	Rp. 14,666,970
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum														Rp. 29,867,788	2 Dokumen	100%	Rp. 21,484,368
7.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	Rp 1,770,577,600	100%	98.85	Rp 1,750,132,335	Rp 2,589,254,900	100%	98.65	Rp 2,554,409,711	Rp 3,004,987,600	100%	99.39	Rp 2,986,524,806	Rp. 3,070,335,057	100%	100%	Rp. 3,040,000,773
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Rp 1,770,577,600	100%	98.85	Rp 1,750,132,335	Rp 2,589,254,900	100%	98.65	Rp 2,554,409,711	Rp 3,004,987,600	100%	99.39	Rp 2,986,524,806	Rp. 3,070,335,057	100 %		Rp. 3,040,000,773



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp 1,770,577,600	12 Pokmas/ ormas	98.85	Rp 1,750,132,335	Rp 2,589,254,900	12 Pokmas/or mas	98.65	Rp 2,554,409,711	Rp 3,004,987,600	12 Pokmas/o rmas	99.39	Rp 2,986,524,806	Rp. 3,070,335,057	12 Pokmas /Ormas	Rp. 3,070,335,057	
			Rp 10,057,382,616		92	Rp 9,276,686,755	Rp 9,150,045,979		95.72	Rp 8,758,020,961	Rp 11,727,589,125		95.16	Rp 11,160,063,435	Rp. 12,885,800,010	100 %	92,49	Rp. 11,175,808,087

Sambaliung, Januari 2026

CAMAT SAMBALIUNG

Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp
NIP.19690918 199212 1 001



3.3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional/Provinsi /Kabupaten/Kota Lain/OPD

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dibanding dengan standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/OPD lain Kecamatan Sambaliung, Realisasi kinerja tahun 2025 berdasarkan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat bernilai 88,96 dalam kategori “Baik (B)”, dan capaian ini dibandingkan dengan capaian secara nasional berdasarkan data di media sosial terdapat angka yang lebih tinggi yaitu 92,7 (sangat baik) dari Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang di Provinsi Banten , sebagai berikut ini

3.3.3.1. Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain/OPD Lain

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kecamatan	Capaian Realisasi Tahun 2025
Meningkatkan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sambaliung Kabupaten Berau	88,96 (Baik) (Berdasarkan Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan Tahun 2025)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kecamatan Pondok Aren Tahun 2025	92,7 (Sangat Baik) https://www.instagram.com/p/DRkM0nzj50a/ https://www.threads.com/@kecamatanpondokaren?xmt=AQF0W8eT7w6BuxOMZdCxbvefIQJOoRyRK8xdG-m0c5nEzC8

3.3.4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Masalah Sumberdaya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sambaliung, terutama untuk sasaran yang ditetapkan dalam renstra 2021-2026 Kecamatan Sambaliung yaitu “Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat “ dengan target capaian IKM sebesar 84,30, di satu sisi target IKM sudah tercapai, namun dalam penilaian kertas kerja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) masih perlu memahami kelengkapan laporan yang diperlukan untuk mendukung peningkatan penilaian evaluasi AKIP, karena



pekerjaan dan kegiatan telah maksimal diselenggarakan berdasarkan aturan yang ada, namun masih kekurangan SDM untuk mengawal terselesaikannya bukti dukung yang diperlukan dalam berbagai dokumen.

Merealisasikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran memerlukan skill ketelitian dan kesabaran, sementara tenaga aparatur di kecamatan punya keterbatasan baik dari skill, pengalaman, pengetahuan dan kurangnya **jumlah orang** yang memiliki skill di bidang pengadministrasian dan akuntansi, yang dibutuhkan untuk mempercepat berjalannya realisasi dokumen-dokumen spj dari kinerja kecamatan yang sedang dijalankan secara fisik. Kebutuhan terhadap SDM yang terampil pada siklus kegiatan dalam merealisasikan anggaran ini, ditambah lagi dengan pekerjaan untuk menyiapkan dokumen perencanaan dan evaluasi hasil kinerja dari perencanaan memerlukan skill SDM yang sesuai sangatlah penting, namun kondisi SDM dengan kualifikasi yang diperlukan oleh tim keuangan dan penyusun perencanaan yang dari segi jumlah masih kurang, membuat capaian penyusunan dan pengarsipan dokumen kegiatan mengalami keterlambatan, sehingga penerapan “the right man on the right place” belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Strategi Pemecahan Masalah

Solusi untuk mengatasi masalah di atas adalah dengan berupaya mengoptimalkan SDM yang ada, dan berusaha mengajukan aparatur yang ada untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan baik dalam bentuk pengajuan anggaran maupun mengikutsertakan mendapatkan bimbingan teknis, pendidikan, pembinaan, sosialisasi, dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain yang berkompeten.

2. Masalah Sarana dan Prasarana

Disamping SDM, sarana dan prasarana juga merupakan salah satu faktor penting dalam upaya pencapaian target kinerja Kecamatan Sambaliung. Kebutuhan terhadap sarana dan prasarana pendukung tercapainya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan masih memerlukan kelengkapan yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi masalah masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menunjang capaian kinerja Kecamatan Sambaliung, perlu



dilakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap,

mengingat kemampuan anggaran Kecamatan Sambaliung yang terbatas.

3. Peraturan atau Kebijakan yang berubah

Sebagaimana diketahui, beberapa tahun terakhir ini telah terjadi beberapa kali perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga peraturan pertanggungjawaban implementasi akuntabilitas capaian kinerja, dimana membutuhkan waktu secara bertahap untuk memahami aturna-aturan tersebut, adanya perbedaan dalam memahami sistem dan prosedur yang baru berpengaruh pada pelaksanaan program kegiatan dan pada akhirnya berpengaruh pula pada pencapaian target kinerja Kecamatan.

3.3.4. Analisis atas Efisiensi penggunaan sumberdaya

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				Efisiensi 2025 (%)
		Target	Realisasi	Capaian Fisik (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian keuangan (%)	Efisiensi (%)	
Pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	98,76%	Rp.8.623.366.161,00	Rp 7.155.181.840,00	82,98	17,03	17,03
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai target	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	84,30	88,96	105%	Rp. 18.009.537,00	Rp. 15.806.986,00	87,77	12,23	12,23
Meningkatnya Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	2 Kampung	2 Kampung	100%	Rp. 3.872.503.032,00	Rp.3.730.639.785,00	96,34	3,66	3,66
Meningkatnya Penurunan Gangguan Kamtibmas	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	100%	83,64%	Rp 96.200.000,00	Rp. 68.838.744	71,56	28,44	28,44
Meningkatnya pemenuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	100%	Rp. 122.543.022,00	76.933.000	63	37	37
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Kampung	Prosentase Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%	100 %	Rp. 153.268.258	Rp 128.407.732	83,78	16,22	16,22



3.3.5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

NO	PROGRAM	INDIKATOR	Capaian	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	98,76 %	Sifat gotong royong dan kerjasama yang baik masih menjadi pendukung utama capaian program ini
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan	IKM 88,96	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) Kategori BAIK
3	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	2 Kampung/ Desa	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat kecamatan, perangkat daerah, hingga lapisan masyarakat.
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	prosentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	Kerjasama yag baik dan koordinasi yang sinergi
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	prosentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100%	Kerjasama dan tanggungjawab baik dari semua pihak mulai tingkat kecamatan, perangkat daerah, hingga masyarakat (linmas).
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	Terlaksananya Program Pembinaan dan Pengawasan Desa

3.4 Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Sambaliung Tahun 2025 meliputi:

1. Reallisasi Anggaran Belanja Pegawai

Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah sebesar : Rp. 6.917.154.174,- terealisasi Rp. **5.587.867.157,-** atau 80,78 %.

2. Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa

Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebesar Rp. . 5.651.213.098,- terealisasi Rp. **5.259.574.046,-** atau 93.07 %.

3. Realisasi Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal Tahun 2025 pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebesar Rp. 317.432.738,- terealisasi Rp. 316.290.500,- atau 99,64 %.



Rincian Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau berdasarkan data LRA 2025:

Tabel 3.4.1 Realisasi Belanja Operasional dan Belanja Modal
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025.

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Operasional	12.885.800.010,-	11.163.731.703,-	86.64
	Belanja Pegawai	6.917.154.174,-	5.587.867.157,-	80.78
	Belanja Barang dan Jasa	5.651.213.098,-	5.259.574.046,-	93,07
2	Belanja Modal	317.432.738,-	316.290.500,-	99,64

Pada Data dasbord di realisasi SIPD, terdapat selisih realisasi senilai Rp.12.076.384,- selisih tersebut pengembalian Belanja kelebihan bayar TPP di bulan April 2025 karena 1 Orang Pegawai PNS meninggal dunia, sehingga data realisasi senilai Rp.11.163.731.703 hanya terbaca di LRA, selisih realisasi pembayaran pada dasbor SIPD dengan data di LRA SIPD senilai Rp.12.076.384,-, dimana total realisasi pad Dasbord SIPD di akhir Desember 2025 adalah Rp. 11.175.808.087,- ini disebabkan adanya aktifitas realisasi terhadap angka TPP tersebut paad sistem aplikasi SIPD di Tahun 2025.

Indikator Pencapaian Target Kinerja Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2025:

Tabel. 3.4.2.
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025
HINGGA BULAN DESEMBER 2025
Kecamatan Sambaliung

KODE	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PA/KPA/PPTK	PAGU ANGGARAN (RP)	Realisasi Belanja			SALDO ANGGARAN		SUMEBE R DANA
				FISIK	KEUANGAN		KEUANGAN		
				(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	8.623.366.161,00	98,76	7.155.181.840,00	82,97	1.468.184.321,00	17,03	APBD
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		96.612.710,00	100,0 0	81.562.182,00	84,42	15.050.528,00	15,58	APBD
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PPTK	41.147.900,00	100,0 0	32.955.600,00	80,09	8.192.300,00	19,91	
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PPTK	29.249.000,00	100,0 0	24.747.960,00	84,61	4.501.040,00	15,39	
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PPTK	26.215.810,00	100,0 0	23.858.622,00	91,01	2.357.188,00	8,99	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambalung Tahun 2025

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.530.558.915,00	100,00	6.165.425.906,00	81,87	1.365.133.009,00	18,13	APBD
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PPTK	6.911.904.174,00	100,00	5.592.993.541,00	80,92	1.318.910.633,00	19,08	
7.01.01.2.02.0002	Penyedia Administrasi Pelaksana Tugas ASN	PPTK	313.663.141,00	100,00	297.040.365,00	94,70	16.622.776,00	5,30	
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PPTK	304.991.600,00	100,00	275.392.000,00	90,29	29.599.600,00	9,71	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		204.080.000,00	100,00	197.461.236,00	96,76	6.618.764,00	3,24	APBD
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	PPTK	62.580.000,00	100,00	62.580.000,00	100,00	-	-	
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	PPTK	141.500.000,00	100,00	134.881.236,00	95,32	6.618.764,00	4,68	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		240.742.444,00	100,00	219.323.477,00	91,10	21.418.967,00	8,90	APBD
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	PPTK	2.999.615,00	100,00	2.628.900,00	87,64	370.715,00	12,36	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PPTK	39.655.700,00	100,00	31.324.897,00	78,99	8.330.803,00	21,01	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	PPTK	7.992.157,00	100,00	7.017.500,00	87,80	974.657,00	12,20	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	PPTK	75.015.000,00	100,00	72.676.000,00	96,88	2.339.000,00	3,12	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	PPTK	7.999.972,00	100,00	2.951.800,00	36,90	5.048.172,00	63,10	
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	PPTK	5.000.000,00	100,00	1.920.000,00	38,40	3.080.000,00	61,60	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	PPTK	102.080.000,00	100,00	100.804.380,00	98,75	1.275.620,00	1,25	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		238.735.635,00	100,00	238.473.000,00	99,89	262.635,00	0,11	APBD
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	PPTK	29.988.468,00	100,00	29.988.000,00	100,00	468,00	0,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PPTK	158.748.008,00	100,00	158.497.000,00	99,84	251.008,00	0,16	
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PPTK	49.999.159,00	100,00	49.988.000,00	99,98	11.159,00	0,02	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		147.994.327,00	100,00	139.375.718,00	94,18	8.618.609,00	5,82	APBD
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	PPTK	3.500.000,00	100,00	2.700.000,00	77,14	800.000,00	22,86	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	PPTK	135.494.327,00	100,00	127.825.718,00	94,34	7.668.609,00	5,66	
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	PPTK	9.000.000,00	100,00	8.850.000,00	98,33	150.000,00	1,67	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		164.642.130,00	91,33	113.560.321,00	91,33	51.081.809,00	31,03	APBD
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PPTK	130.000.000,00	100,00	94.189.321,00	72,45	35.810.679,00	27,55	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	PPTK	9.650.000,00	100,00	9.240.000,00	95,75	410.000,00	4,25	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PPTK	24.992.130,00	74,00	10.131.000,00	40,54	14.861.130,00	59,46	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	18.009.537,00	100,00	15.806.986,00	87,77	2.202.551,00	12,23	APBD
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan		18.009.537,00	100,00	15.806.986,00	87,77	2.202.551,00	12,23	APBD
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	PPTK	18.009.537,00	100,00	15.806.986,00	87,77	2.202.551,00	12,23	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	802.167.975,00	100,00	690.639.012,00	86,10	111.528.963,00	13,90	APBD
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		735.255.079,00	100,00	630.949.284,00	85,81	104.305.795,00	14,19	APBD
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	PPTK	49.422.944,00	100,00	45.255.160,00	91,57	4.167.784,00	8,43	
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	PPTK	462.000.000,00	100,00	387.726.024,00	83,92	74.273.976,00	16,08	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	PPTK	223.832.135,00	100,00	197.968.100,00	88,44	25.864.035,00	11,56	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		66.912.896,00	100,00	59.689.728,00	89,21	7.223.168,00	10,79	APBD
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	PPTK	66.912.896,00	100,00	59.689.728,00	89,21	7.223.168,00	10,79	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	96.200.000,00	83,64	68.838.744,00	71,56	27.361.256,00	28,44	APBD
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		96.200.000,00	83,64	68.838.744,00	71,56	27.361.256,00	28,44	APBD
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	PPTK	96.200.000,00	83,64	68.838.744,00	71,56	27.361.256,00	28,44	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	122.453.022,00	65,00	76.933.000,00	62,83	45.520.022,00	37,17	APBD
7.01.05.1.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		122.453.022,00	65,00	76.933.000,00	62,83	45.520.022,00	37,17	APBD
7.01.05.1.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	PPTK	122.453.022,00	65,00	76.933.000,00	62,83	45.520.022,00	37,17	
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp	153.268.258,00	100,00	128.407.732,00	83,78	24.860.526,00	16,22	APBD
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		153.268.258,00	100,00	128.407.732,00	83,78	24.860.526,00	16,22	APBD
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	PPTK	103.999.700,00	100,00	92.256.394,00	88,71	11.743.306,00	11,29	
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	PPTK	19.400.770,00	100,00	14.666.970,00	75,60	4.733.800,00	24,40	
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PPTK	29.867.788,00	100,00	21.484.368,00	71,93	8.383.420,00	28,07	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Iskandar Zulkarnain, S.E	3.070.335.057,00	100,00	3.040.000.773,00	99,01	30.334.284,00	0,99	APBD
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		3.070.335.057,00	100,00	3.040.000.773,00	99,01	30.334.284,00	0,99	APBD
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	PPTK	3.070.335.057,00	100,00	3.040.000.773,00	99,01	30.334.284,00	0,99	
Jumlah			12.885.800.010,00	92,49	11.175.808.087,00	86,73	1.709.991.923,00	13,27	

Sambaliung, Januari 2026

CAMAT SAMBALIUNG



Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp
NIP.19690918 199212 1 00

Dari tabel di atas dapat kita lihat antara target kinerja, realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing program dan kegiatan pada Kecamatan Sambaliung pada tahun Anggaran 2025 sebagai berikut Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar (98,76 %) atau **Rp.7.155.181.840,00** (tujuh milyar Seratus Limapuluh lima juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah), Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 100% (Realisasi fisik) dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 15.806.986,00 (Lima Belas Juta Delapan Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar (100 % fisik) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.730.639.785, 00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga puluh juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) ratus ribu tujuh ratus lima rupiah), Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar (83,64 % realisasi fisik) atau Rp. 68.838.744,00 (Enam Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), dan Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar 65% realisasi fisik) atau Rp. 76.933.000,00 (tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 128.407.732,00 dengan realisasi fisik 100 %. Secara Keseluruhan realisasi program dan kegiatan fisik dan keuangan Kecamatan Sambaliung adalah 92,49% realisasi fisik tau Rp. 11.175.808.087,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh juta lima juta delapan ratus delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output)



dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Kecamatan Sambaliung dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Sambaliung Tahun 2025.

- a) Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- b) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2025, Kecamatan Sambaliung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5(lima) program sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus:

Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggun

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} = 100 \%$$

Hasil pengukuran dibagi menjadi 4(empat) skala nilai peringkat kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

- a) $91 \% \leq 100 \% = \text{Sangat Tinggi (ST)}$
- b) $76 \% \leq 90\% = \text{Tinggi (T)}$
- c) $66 \% \leq 75 \% = \text{Sedang (S)}$
- d) $51\% \leq 65 \% = \text{Rendah (R)}$
- e) $\leq 50 \% = \text{Sangat Rendah (SR)}$

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara target kinerja, realisasi fisik dan keuangan pada Kecamatan Sambaliung dapat berjalan dengan baik pada skala kategori penilaian **Sangat Tinggi** dengan realisasi fisik



sebesar **92,49 %**. walapun realisasi fisik tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, dikarenakan adanya kegiatan yang belum terealisasi dengan maksimal, namun secara keseluruhan tidak mempengaruhi kelancaran kegiatan operasional Pelayanan Kantor Kecamatan Sambaliung.

Kegiatan operasional Kecamatan Sambaliung, juga memuat aktifitas memberikan pelayanan surat atau jenis surat yang lain. Pelayanan yang diberikan antara lain: Pelayanan Umum, Pemerintahan, Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial. Dalam pelayanan pada Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tidak memungut biaya/retribusi.

Di bawah ini dapat dilihat Jenis Pelayanan di Kantor Kecamatan Sambaliung yang disajikan dalam Tabel berikut ini:

Tabel 3.4.3 Jenis Pelayanan di Kantor Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

No	Bidang Pelayanan	Jumlah	Penerimaan
1	2	3	4
1	Surat Pengantar Kartu Keluarga		
2	Surat Pengantar KTP		
3	Surat Pengantar Pindah		
4	Surat Pengantar SKCK		
5	Surat Keterangan Ahli Waris		
6	Rekomendasi Bansos		
7	Rekomendasi Surat Dispensasi Nikah		
8	Rekomendasi Pembuatan IMB		
9	Rekomendasi Tambang Galian C		
10	Pelayanan Legalisasi SKTM Berobat		
11	Rekomendasi Izin Keramaian		
12	Rekomendasi Pembuatan SITU / SIUP		
13	Surat Akte Kelahiran		
14	Surat Pernyataan Melepaskan Penguasaan Atas Tanah		
15	Pelayanan Surat Rekomendasi ADK/ADD		
16	Pelayanan Surat Rekomendasi Penggunaan Fasilitas Umum		
17	Pelayanan Surat Rekomendasi Pendirian Paud		
18	Pelayanan Surat Rekomendasi Beasiswa		
19	Pelayanan Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan		



BAB IV

P E N U T U P

A. Tinjauan Umum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau merupakan dokumen yang berisi gambaran pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. LKj-IP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

B. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Sambaliung sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Sambaliung dan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau No.80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, dimana pengelolaan sumberdaya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berkontribusi tercapainya sasaran kinerja di Tahun 2025. Faktor pendukung dan faktor penghambat sudah dijabarkan dalam BAB III dokumen LKJIP ini.

Secara garis besar hambatan yang dialami dalam mencapai sasaran kinerja Kecamatan Sambaliung antara lain sebagai berikut:

- Semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, serta penggunaan aplikasi/digitalisasi dalam menjalankan pekerjaan administrasi, baik ditingkat Kecamatan, Kelurahan maupun Kampung, namun masih kurang SDM kompeten yang memenuhi skill sesuai kebutuhan dalam merealisasikan rencana kerja, dan anggaran peningkatan SDM juga terbatas.
- Sarana dan prasarana yang belum optimal/kurang, dan belum semua aparatur di Kecamatan mampu mengoperasikan perangkat administrasi seperti perangkat IT (Komputer, printer, skill word , Excel, ppt, pdf)

Adapun langkah-langkah untuk meminimalkan hambatan-hambatan tersebut adalah:



- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan memanfaatkan SDM yang terampil untuk memberikan bantuan berupa pendampingan, pembinaan, dan mengikutsertakan bimbingan teknis dan diklat-diklat.
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada

C. Saran dan tindak lanjut.

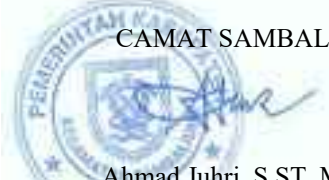
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan kedepannya sesuai dengan strategis yang telah ditetapkan agar semua kendala dan hambatan yang lalu tidak terulang.

Kantor Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau telah menjalankan tugas sesuai fungsi yang ada sehingga dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 88,96 dalam Indeks Kepuasan Masyarakat telah melampaui target yang diencanakan dalam Renstra 2021-2026 sebesar 84,30. Tingkat IKM yang didapat selama tahun 2025 telah melampaui target yang direncanakan, hal ini menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan ramah, transparan, cepat, mudah, dan gratis.

Perencanaan anggaran, ketersediaan dan kesiapan aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, anggaran yang seimbang adalah merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah direncanakan.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Sambaliung ini disusun agar dapat memberikan manfaat untuk kita semua.

Sambaliung, Januari 2026

CAMAT SAMBALIUNG

Ahmad Juhri, S.ST, MPSSp
 NIP.19690918 199212 1 001



Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SAMBALIUNG TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD JUHRI, S.ST.,MPSSp
Jabatan : CAMAT SAMBALIUNG
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HJ. SRI JUNIARSIH, MAS,M.PD.
Jabatan : BUPATI BERAU
Selaku Atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sambaliung, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BERAU

HJ. SRI JUNIARSIH, MAS, M.PD.

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAMBALIUNG

AHMAD JUHRI, S.ST., M.PSSp
PEMBINA
NIP. 19690918 199212 1 001



Lanjutan Lampiran 1

PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SAMBALIUNG TAHUN 2025

Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran

: KECAMATAN SAMBALIUNG
: 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,30

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.724.635.426,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 29.999.689,-	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 3.519.694.947,-	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 40.000.000,-	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 124.999.952,-	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 224.999.558,-	APBD
Jumlah		Rp. 10.664.329.572,-	APBD

Sambaliung, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA
BUPATI BERAU

H. SRI JUNARSIH, M.S., M.P.D.

PIHAK PERTAMA
CAMAT SAMBALIUNG

AHMAD JUHRI S. ST., M.PSSp
PEMBINA
NIP. 19690918 199212 1 001



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

Lampiran 2.

RENCANA KERJA TAHUNAN RENCANA KECAMATAN SAMBALIUNG TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
						Kecamatan Sambaliung						
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					8.041.153.572	
	7	01				KECAMATAN					8.041.153.572	
1	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik	100 %	6.724.635.426,00			
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	280.200.000,00			
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	65.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	100.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	5.715.631.114			
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	5.044.881.114	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	485.750.000	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	185.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan penunjang urusan pemerintah daerah	3 Laporan	149.580.000			
	7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45 Paket	58.080.000	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10 Orang	91.500.000	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	290.391.492			
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.999.615	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	7.992.157	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										esa		
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.999.972	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										esa		
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	130.200.000	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	130.002.090			
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel						
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12 Unit	29.988.468	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit	50.014.463	Kab. Berau, Semua	DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAMBALIUNG



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										Kecam atan, Semua Kel/D esa	(DAU)	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	104.140.000,00			
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 TAHUN Laporan	3.500.000,00	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	91.638.600	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 UNIT Laporan	9.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	119.892.130			
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	90.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	. 4.900.000	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.992.130	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
2	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan Dengan Baik	100 %	29.999.689			
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	29.999.689			
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Bulan Laporan	29.999.689	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kegiatan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Kecamatan	100 %	896.518.947,00			
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kampung dan Kelurahan mandiri	5 kampung	811.519.351,00			
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	49.999.944	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan						
							Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	12 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	261.519.407	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kampung dan Kelurahan Berkembang	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.999.596			
	7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	84.999.596	Kab. Berau, Sambaliung, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	40.000.000,00			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kegiatan Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Bulan	40.000.000,00			
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100 %	124.999.952			
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan yang terselenggara	2 Kegiatan	124.999.952			
	7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	1 Kegiatan Orang	124.999.952	Kab. Berau, Semua	DANA ALOKASI UMUM	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Bangsa			Kecamatan, Semua Kel/D esa	(DAU)	
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitas, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 %	224.999.558			
	7	01	06	2.01		Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Bulan	224.999.558			
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	49.999.770	Kab. Berau, Semua Kecamatan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										atan, Semua Kel/D esa		
	7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						
							Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	49.999.788	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
	X					NON URUSAN			92.000.000,00			
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			92.000.000,00			
7	X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	92.000.000,00			
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	42.000.000,00			
	X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	41.999.748	Kab. Berau, Semua Kecamatan,	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG



N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
										Semua Kel/D esa		
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	49.999.159			
	X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	49.999.159	Kab. Berau, Semua Kecam atan, Semua Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KECAMATAN SAMBALIUNG
						Kelurahan sambaliung			2.623.176.000			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN			2.623.176.000			
	7	01				KECAMATAN			2.623.176.000			
8	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-	2.623.176.000			
	7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	2.623.176.000			
	7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2					3	4	8	9	10	11	17
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	2.623.176.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Sambaliung, Sambaliung	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	KELURAHAN SAMBALIUNG
								J U M L A H	10.664.329.572			



Ringkasan Lampiran 2:

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Instansi : Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Tahun : 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,30 %

NO	Program	Anggaran Rp	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.724.635.426,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 29.999.689,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	Rp. 3.519.694.947,-	APBD
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 40.000.000,-	APBD
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 124.999.952,-	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 224.999.558,-	APBD
	Jumlah	Rp. 10.664.329.572,-	



Sambaliung, Januari 2025

Pihak Pertama
CAMAT SAMBALIUNG

AHMAD JUHRI, S.ST., M.PSSp
PEMBINA
NIP. 19690918 199212 1 001



Lampiran 3.

PENGUKURAN KINERJA TAHUNAN

Instansi : Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Tahun : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,30	88,96	105 %
		Nilai Rata-Rata LKj-IP perangkat Daerah	Nilai	75,30	53,80	71,45%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 29.999.689,-
2	Program Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Rp. 3.519.694.947,-
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 40.000.000,-
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 124.999.952,-
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 224.999.558,-
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota	Rp. 6.724.635.426,-
Jumlah		Rp. 10.664.329.572,-

Sambaliung, Desember 2025

Pihak Pertama
CAMAT SAMBALIUNG

AHMAD JUHRI, S.ST.,M.PSSp
 PEMBINA
 NIP. 19690918 199212 1 001



Lampiran 4. Lain-lain yang di anggap perlu

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

1. Perangkat Daerah : Kecamatan Sambaliung
2. Jabatan : Camat Sambaliung
3. Tugas : Melaksanakan Tugas Umum Pemerintahan
4. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-perundangan daerah dan Peraturan Bupati
 - e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana Pelayanan Umum
 - f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah Kecamatan
 - g. Membina dan Mengawasi penyelenggaraan kegiatan kampung dan/atau kelurahan
 - h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan

No.	Sasaran/Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Nilai Survey Indek Kepuasan (IKM) Kecamatan Sambaliung Kab.Berau	Laporan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Permenpan 14 Tahun 2017 dan SK Menpan No. 25 Tahun 2004)	Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Nilai Evaluasi LKjIP	Meningkatkan kualitas Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai	Sesuai Permenpan No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Hasil Evaluasi dari Inspektorat



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

lampiran 5: Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau Tahun 2021-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	Rp 4,403,428,392	100%	Rp 3,128,000,000	100%	Rp 3,329,500,000	100%	Rp 3,449,500,000	100%	Rp 5,279,000,000	100%	Rp 5,429,000,000	100%	Rp 20,656,428,392	
01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	Rp 85,000,000	100%	Rp 100,000,000	100%	Rp 105,000,000	100%	Rp 110,000,000	100%	Rp 120,000,000	100%	Rp 132,000,000	100%	Rp 520,000,000	
01	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp 50,000,000	2 Dokumen	Rp 60,000,000	2 Dokumen	Rp 65,000,000	2 Dokumen	Rp 65,000,000	2 Dokumen	Rp 70,000,000	2 Dokumen	Rp 77,000,000	10 Dokumen	Rp 310,000,000	CAMAT
01	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja Yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	Rp 10,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 15,000,000	5 Dokumen	Rp 16,500,000	25 Dokumen	Rp 70,000,000	
01	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan			Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 30,000,000	1 Kegiatan	Rp 35,000,000	1 Kegiatan	Rp 38,500,000	4 Kegiatan	Rp 140,000,000	
01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	Rp 3,909,197,392	100%	Rp 2,340,000,000	100%	Rp 2,400,000,000	100%	Rp 2,460,000,000	100%	Rp 4,120,000,000	100%	Rp 4,120,000,000	100%	Rp 15,229,197,392	
01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 3,571,603,392	12 Bulan	Rp 2,250,000,000	12 Bulan	Rp 2,300,000,000	12 Bulan	Rp 2,350,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000,000	60 Bulan	Rp 14,471,603,392	
01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kegiatan yang disediakan untuk Pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12 Bulan	Rp 337,594,000	12 Bulan	Rp 90,000,000	12 Bulan	Rp 100,000,000	12 Bulan	Rp 110,000,000	12 Bulan	Rp 120,000,000	12 Bulan	Rp 120,000,000	60 Bulan	Rp 757,594,000	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

01	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	60 Bulan	Rp 375,000,000	
01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 5,000,000		Rp 25,000,000	
01	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Legalitas Barang milik daerah yang diamankan kepemilikannya		1 Paket	Rp 5,000,000		5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	2 Kegiatan	5,000,000	6 Kegiatan	Rp 25,000,000	
01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp -		Rp 30,000,000		Rp 75,000,000		Rp 40,000,000		Rp 45,000,000		Rp 105,000,000		Rp 190,000,000	
01	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pegawai yang dibuatkan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya						29 Stel	Rp 40,000,000	25 Stel		25 Stel		30 Stel	Rp 50,000,000	100 Stel	Rp 40,000,000	
01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimtek, pelatihan, studi banding yang dilaksanakan				1 Kegiatan	Rp 30,000,000	1 Kegiatan	Rp 35,000,000	1 Kegiatan	Rp 40,000,000	1 Kegiatan	Rp 45,000,000	1 Kegiatan	Rp 55,000,000	100%	Rp 150,000,000	
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 178,731,000	100%	Rp 224,500,000	100%	Rp 253,000,000	100%	Rp 285,500,000	100%	Rp 313,500,000	100%	Rp 346,450,000	100%	Rp 1,601,681,000	
01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen listrik/penrangan bangunan kantor Yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2,750,000	12 Bulan	Rp 3,000,000	12 Bulan	Rp 3,500,000	12 Bulan	Rp 4,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000	12 Bulan	Rp 4,000,000	60 Bulan	Rp 21,250,000	
01	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 Bulan	Rp 15,000,000	12 Bulan	Rp 20,000,000	12 Bulan	Rp 25,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	60 Bulan	Rp 135,000,000	
01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2,989,000	12 Bulan	Rp 5,000,000	12 Bulan	Rp 7,000,000	12 Bulan	Rp 8,000,000	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 Bulan	Rp 11,000,000	60 Bulan	Rp 43,989,000	
01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah kegiatan disediakan bahan logistik kantor	12 Bulan	2500 Kotak	Rp 79,992,000	2600 Kotak	Rp 85,000,000	2600 Kotak	Rp 95,000,000	2700 Kotak	Rp 100,000,000	3000 Kotak	Rp 110,000,000	3000 Kotak	Rp 121,000,000	13400 Kotak	Rp 590,992,000	CAMAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambalung Tahun 2025

01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah kegiatan disediakan Bahan Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	2 Jenis	Rp 3,000,000	2 Jenis	Rp 4,000,000	2 Jenis	Rp 5,000,000	2 Jenis	Rp 6,000,000	2 Jenis	Rp 7,000,000	2 Jenis	Rp 7,700,000	10 Jenis	Rp 32,700,000
01	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan disediakan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	Rp 5,000,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 8,250,000	48 Bulan	Rp 43,250,000
01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan rakor dan konsultasi skpd yang dilaksanakan	12 Bulan	100 Kali	Rp 50,000,000	100 Kali	Rp 75,000,000	100 Kali	Rp 80,000,000	100 Kali	Rp 95,000,000	100 Kali	Rp 100,000,000	100 Kali	Rp 110,000,000	500 Kali	Rp 510,000,000
01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem berbasis elektronik pada SKPD	1 Paket	1 Paket	Rp 25,000,000	1 Paket	Rp 30,000,000	1 Paket	Rp 35,000,000	1 Paket	Rp 40,000,000	1 Paket	Rp 45,000,000	1 Paket	Rp 49,500,000	4 Paket	Rp 224,500,000
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp 75,000,000	100%	Rp 53,000,000	100%	Rp 75,000,000	100%	Rp 105,000,000	100%	Rp 205,000,000	100%	Rp 217,500,000	100%	Rp 730,500,000
01	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan	12 Bulan	2 Unit	Rp 75,000,000							2 Unit	Rp 80,000,000	2 Unit	Rp 80,000,000	4 Unit	Rp 235,000,000
01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4 Jenis			4 Jenis	Rp 33,000,000	4 Jenis	Rp 45,000,000	4 Jenis	Rp 55,000,000	4 Jenis	Rp 65,000,000	4 Jenis	Rp 71,500,000	20 Jenis	Rp 269,500,000
01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana pendukung gedung / bangunan lainnya yang diadakan				1 Paket	Rp 20,000,000	1 Paket	Rp 30,000,000	1 Paket	Rp 50,000,000	1 Paket	Rp 60,000,000	1 Paket	Rp 66,000,000	4 Paket	Rp 226,000,000
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 72,200,000	100%	Rp 138,000,000	100%	Rp 143,500,000	100%	Rp 149,000,000	100%	Rp 149,500,000	100%	Rp 149,950,000	100%	Rp 802,150,000
01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai yang disediakan	12 Bulan	200 Lembar	Rp 2,200,000	300 Lembar	Rp 3,000,000	350 Lembar	Rp 3,500,000	400 Lembar	Rp 4,000,000	450 Lembar	Rp 4,500,000	450 Lembar	Rp 4,950,000	1700 Lembar	Rp 22,150,000
01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah bulan disediakan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	Rp 70,000,000	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 80,000,000	12 Bulan	Rp 85,000,000	12 Bulan	Rp 85,000,000	12 Bulan	Rp 85,000,000	60 Bulan	Rp 480,000,000

CAMAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambalung Tahun 2025

01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	12 Bulan			12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	12 Bulan	Rp 60,000,000	48 Bulan	Rp 300,000,000
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 78,300,000	100%	Rp 237,500,000	100%	Rp 273,000,000	100%	Rp 295,000,000	100%	Rp 321,000,000	100%	Rp 353,100,000	100%	Rp 1,557,900,000
01	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	Rp 75,000,000	12 Bulan	Rp 200,000,000	12 Bulan	Rp 230,000,000	12 Bulan	Rp 250,000,000	12 Bulan	Rp 270,000,000	12 Bulan	Rp 297,000,000	60 Bulan	Rp 1,322,000,000
01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	12 Bulan	12 Bulan	Rp 3,300,000	12 Bulan	Rp 7,500,000	12 Bulan	Rp 8,000,000	12 Bulan	Rp 10,000,000	12 Bulan	Rp 11,000,000	12 Bulan	Rp 12,100,000	60 Bulan	Rp 51,900,000
01	2.09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor dan Lahan Bangunan Kantor yang dipelihara	12 Bulan			12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	12 Bulan	Rp 40,000,000	12 Bulan	Rp 44,000,000	48 Bulan	Rp 184,000,000
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan			Rp 2,000,000		Rp 2,000,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 2,500,000	100%	Rp 14,000,000
2	202	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	100 Orang	Kuisisioner	Rp 2,000,000	Kuisisioner	Rp 2,000,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 2,500,000	Kuisisioner	Rp 14,000,000
4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa mandiri			Rp -	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 135,000,000

CAMAT

CAMAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

4	201	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa yang dilaksanakan				12 Bulan	Rp 20,000,000	12 Bulan	Rp 25,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	48 Bulan	Rp 135,000,000	
3			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAN	Cakupan pembinaan olahraga				Rp -	100%	Rp 30,000,000	100%	Rp 35,000,000	100%	Rp 40,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 55,000,000	100%	Rp 210,000,000
3	205	6	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah olahraga tradisional yang dibina				2 Kegiatan	Rp 30,000,000	2 Kegiatan	Rp 35,000,000	2 Kegiatan	Rp 40,000,000	2 Kegiatan	Rp 50,000,000	2 Kegiatan	Rp 55,000,000	8 Kegiatan	Rp 155,000,000	
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri		100%		Rp 2,059,975,000	100%	Rp 710,000,000	100%	Rp 775,000,000	100%	Rp 835,000,000	100%	Rp 900,000,000	100%	Rp 900,000,000	100%	Rp 6,179,975,000
3	202	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Kelurahan dan RT yang di fasilitasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan		Rp 1,410,000,000	12 Bulan	Rp 30,000,000	12 Bulan	Rp 35,000,000	12 Bulan	Rp 40,000,000	12 Bulan	Rp 50,000,000	12 Bulan	Rp 50,000,000	60 Bulan	Rp 1,615,000,000
3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah bulan dibayarkannya honor pejuang sigap sejahtera	13 Kampung	12 Bulan		Rp 579,975,000	12 Bulan	Rp 600,000,000	12 Bulan	Rp 650,000,000	12 Bulan	Rp 700,000,000	12 Bulan	Rp 750,000,000	12 Bulan	Rp 750,000,000	60 Bulan	Rp 4,029,975,000
3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	12 Bulan	12 Bulan		Rp 70,000,000	12 Bulan	Rp 80,000,000	12 Bulan	Rp 90,000,000	12 Bulan	Rp 95,000,000	12 Bulan	Rp 100,000,000	12 Bulan	Rp 100,000,000	60 Bulan	Rp 535,000,000
																				CAMAT



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas			Rp 150,000,000		Rp 150,000,000		Rp -		Rp -		Rp -		Rp -		Rp 300,000,000	
4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang dilaksanakan		12 Bulan	Rp 150,000,000		12 Bulan	Rp 150,000,000								24 Bulan	Rp 300,000,000	
5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	Rp 20,000,000		100%	Rp 25,000,000	100%	Rp 35,000,000	100%	Rp 40,000,000	100%	Rp 50,000,000	100%	Rp 55,000,000	100%	Rp 225,000,000
5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan HUT RI yang dilaksanakan		1 Kegiatan	Rp 20,000,000		1 Kegiatan	Rp 25,000,000	1 Kegiatan	Rp 35,000,000	1 Kegiatan	Rp 40,000,000	1 Kegiatan	Rp 50,000,000	1 Kegiatan	Rp 55,000,000	5 Kegiatan	Rp 225,000,000
6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100%	Rp 12,500,000		100%	Rp -	100%	Rp 60,000,000	100%	Rp -	100%	Rp 20,000,000	100%	Rp 22,000,000	100%	Rp 114,500,000
6	201	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Kampung yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa		5 Kampung	Rp 12,500,000	-	-	6 Kampung	Rp 60,000,000	-	-	2 Kampung	Rp 20,000,000	5 Kampung	Rp 22,000,000	13 Kampung	Rp 114,500,000	
TOTAL						100%	Rp 6,647,903,392	100%	Rp 4,065,000,000	100%	Rp 4,262,000,000	100%	Rp 4,397,000,000	100%	Rp 6,331,500,000	100%	Rp 6,493,500,000	100%	Rp 27,834,903,392	



Lampiran 6.

REALISASI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)		84,30	88,96
		Nilai Rata-rata LKj-IP Perangkat Daerah		75,30	-

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik (%)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 8.623.366.161,-	Rp. 7.155.181.400,-	98,76	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 18.009.357,-	Rp. 15.806.986,-	100	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	Rp. 3.872.503.032,-	Rp. 3.730.639.785,-	100	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 96.200.000,-	Rp. 68.838.744,-	83,64	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 122.453.022,-	Rp. 76.933.000,-	65	APBD
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 153.268.258,-	Rp. 128.407.732,-	100	APBD
		Rp. 12.885.800.010,-	Rp. 11.175.808.087,-	92,49	

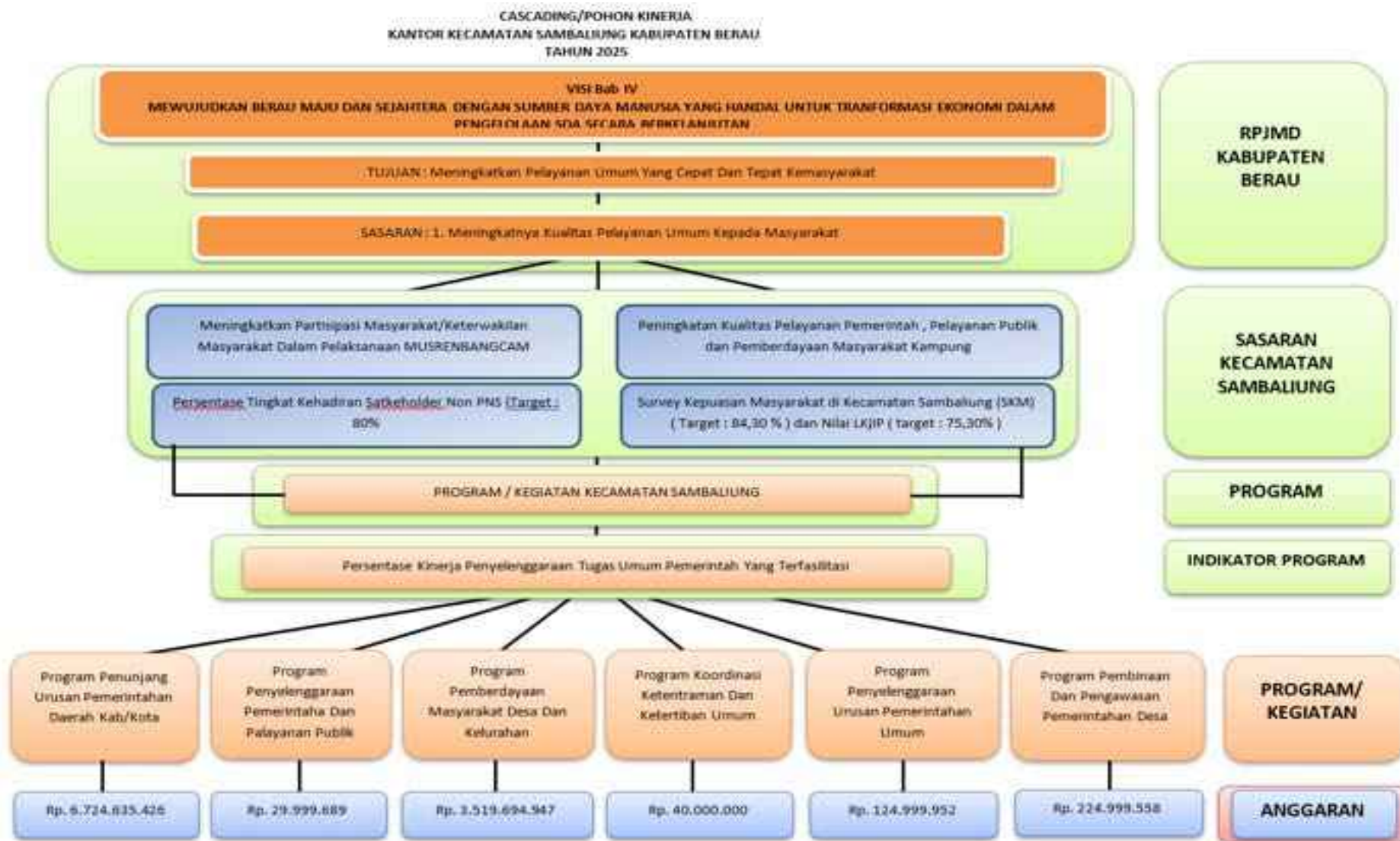
Sambaliung, Desember 2025

CAMAT SAMBALIUNG





Lampiran 7





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Sambalung Tahun 2025

Lampiran 8

VISI : "Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan "				
MISI : Menciptakan Tata Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa, Transparan Dan Akuntabel"				
TUJUAN : Meningkatkan Pelayanan umum Yang Cepat Dan Tepat ke Masyarakat				
ARAH KEBUJAKAN : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan		SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Ditaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP)
Kecamatan Sambaliung Tahun 2025

atau Bangunan Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
SEKRETARIS CAMAT	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



CROSSCUTTING (HUBUNGAN) KECAMATAN SAMBALIUNG

